SISTEM PERWAKILAN POLITIK DI ERA MODERN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

2021

SISTEM PERWAKILAN POLITIK DI ERA MODERN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

UKI PRESS
Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta

SISTEM PERWAKILAN POLITIK DI ERA MODERN

Penulis:
Dr. Osbin Samosir, M.Si

Editor:
Dr. Chontina Siahaan, M.Si

ISBN: 978-623-6963-27-2

Penerbit: UKI Press
Anggota APPTI
Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2021
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Buku Referensi:

SISTEM PERWAKILAN POLITIK DI ERA MODERN

Oleh: Dr Osbin Samosir, M.Si.

Kupersembahkan untuk ketiga anakku yang masih sangat belia:

Hieronymus Halashon, Eduardo Daomara, dan Rose Ika.

Juga untuk istriku Goretti Manurung….

Semoga mereka semakin *BANGGA* sebagai *INDONESIA*….

KATA PENGANTAR

Salah satu wujud nyata kami mencintai Indonesia dan mencintai demokrasi adalah menghadirkan buku ini ke tengah- tengah masyarakat luas. Buku ini sudah lama kami impikan untuk memperkaya buku-buku perwakilan politik serupa yang sudah terlebih dahulu hadir.

Senang sekali rasanya bahwa Buku Referensi **Sistem Perwakilan Politik di Era Modern** ini bisa hadir ditengah-tengah para peminat Ilmu Politik dan para penggiat pemilihan umum secara luas, serta untuk para mahasiswa Ilmu Politik secara khusus, dan tentu juga bagi mahasiswa yang berminat memahaminya. Semoga buku ini memberi manfaat bagi para pencari upaya untuk mengerti Sistem Perwakilan politik yang lebih baik.

Buku ini berbeda dari buku-buku sebelumnya terkait system Perwakilan Politik yang sudah terlebih dahulu hadir. Kebaruan paling mendasar (*newest/novelty*) dari buku ini adalah format pemikirannya yang memperkaya dari isi buku-buku system perwakilan politik sebelumnya. Dalam buku-buku Sistem Perwakilan Politik yang selama ini hadir memuat tentang sejarah system perwakilan, jenis-jenis lembaga, format-format system legislative atau presidensial di Inggris, Amerika, dan Eropah pada umumnya, dan bentuk-bentuk tekhnis lainnya.

Perbedaan mendasarnya dengan buku ini adalah ketika buku ini justru tidak membahas mendalam system-sistem itu lagi karena sudah terlalu banyak dan sudah menjadi isu yang tidak mendapat pembaharuan berarti sejak hamper 200 tahun terakhir. Buku ini sangat berbeda dari semua buku-buku sebelumnya tersebut, karena buku ini lebih melihat bagaimana formasi atau upaya perwakilan politik bisa dihadirkan di era modern dewasa ini.

Buku ini justru melihat, jika misalnya di zaman masa awal demokrasi bahwa ideologi partai politik sebagai satu-satunya ukuran

determinan penentuan perwakilan politik, dalam era dewasa ini justru mengalami pembaharuan sangat signifikan ketika ideologi partai politik justru hampir ditinggalkan di seluruh dunia. Figure politik, kehadiran langsung pihak yang diwakili, pengaruh primordialisme politik, termsuk politik identitas dalam pemilihan umum dalam konteks Indonesia menjadi format mendasar buku ini merumuskan Sistem Perwakilan Politik di Era Modern.

Buku ini tentu saja tidak sempurna dan sangat mengharapkan lahirnya buku-buku lain yang saling memperkaya untuk melihat demokrasi semakin matang dan terus merambah seluruh dunia dengan penghargaan pada marabat manusia termasuk demokrasi di Indonesia dewasa ini. Penghargaan besar demokrasi adalah ketika masyarakat pemilih diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan siapa yang menjadi perwakilan politik masyarakat di lembaga-lembaga negara yang terhormat.

Hormat dan terimakasih kami yang sangat besar kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr Dhaniswara K. Harjono, para wakil rektor (Dr Wilson Rajagukguk, Dr M.L Denny Tewu, Angel Damayanti, Ph.D, Dr. Ied Veda R. Sitepu), Dekan Fisipol UKI Dr Verdinand Robertua Siahaan, Wakil Dekan Indah Novitasari, Ketua Program Studi Ilmu Politik Fransiskus X. Gian Tue Mali. Terkhusus kepada editor buku ini Dr Chontina Siahaan saya haturkan rasa bangga yang tinggi. Juga kepada para dosen Ilmu Politik Fisipol UKI: Dr. Isbodroini Suyanto, Dr. Sidratahta Mukhtar, Dr. Audra Jovani, Budi Chrismanto Sirait, dan terkhusus untuk Julfrio Putra Gultom yang membantu banyak proses administrasi.

Juga kepada semua pihak yang telah turut membantu terbitnya buku ini saya ucapkan terimakasih. Salam hormat dan kasih…

Jakarta, Selasa 1 Juni 2021,
Peringatan Hari Lahir Pancasila
Penulis,
DR OSBIN SAMOSIR, M.Si

DAFTAR ISI

	Hlm.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Synopsis	v
Seri Sistem Perwakilan Politik 1:	
KONSEP DAN PENGERTIAN SISTEM PERWAKILAN POLITIK	1
1. Pengantar	1
2. Demokrasi Yunani dan Keruntuhannya	2
3. Lahirnya kembali Demokrasi	5
4. Peletak Dasar Sistem Perwakilan	7
a. Perwakilan Politik menurut Thomas Hobbes	8
b. Perwakilan Politik menurut John Locke	12
c. Perwakilan Politik menurut Montesquieu	15
d. Perwakilan Politik menurut JJ. Rousseau	18
5. Format Sistem Perwakilan Modern	23
6. Penutup	25
Seri Sistem Perwakilan Politik 2:	
FIGUR POLITIK, PROGRAM PARTAI, DAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK	**26**
1. Pengantar	26
2. Kehadiran Figur Politik	27
3. Kedalaman Penetrasi Partai Politik	32
4. Seleksi Kandidat Partai	38
5. Penutup	42
Seri Sistem Perwakilan Politik 3:	
POLITIK KEHADIRAN SEBAGAI BENTUK PERWAKILAN POLITIK	**45**
1. Pengantar	45

2. *Politics of Presence* Sebagai Pengakuan Kesetaraan 45
3. Kontrol Publik dan Persamaan Politik 47
4. Politik Gagasan Para Kandidat 51
5. *Politics of Presence* dalam Pemerintahan Mayoritas 56
6. Penutup 60

Seri Sistem Perwakilan Politik 4:
IKATAN PRIMORDIAL DALAM PERWAKILAN POLITIK 61
1. Pengantar 61
2. Lahirnya Kepentingan Politik Primordial 62
3. Sifat Alami Kelompok Primordial 66
4. Dampak Kelompok Primordialisme 70
5. Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis 74
6. Penutup 77

Seri Sistem Perwakilan Politik 5:
POLITIK ALIRAN, FIGUR PEMIMPIN DAN NASIONALISME 78
1. Pengantar 78
2. Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya 79
3. Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI 85
4. Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik 96
5. Penutup 101

Seri Sistem Perwakilan Politik 6:
KETERWAKILAN POLITIK PADA PEMILU ERA REFORMASI: Belajar dari Keterpilihan Minoritas 103
1. Pengantar 103
2. Maraknya Politik Identitas 105
3. Nasib Politisi Kristen di Basis Islam 110
4. Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen 114
5. Penutup 116

DAFTAR PUSTAKA 119

Synopsis:

Sistem keterwakilan politik dewasa ini lebih ditentukan oleh kejelian dan kualitas pemilih terhadap para calon yang kelak menjadi wakil mereka di lembaga-lembaga negara. Sebab sangat disadari bahwa kualitas dan kehadiran para wakil politik masyarakat di lembaga-lembaga negara entah sebagai legislatif atau sebagai eksekutif, akan sangat menentukan kebijkan politik yang diambil. Setiap kebijakan politik akan langsung berurusan dengan kehidupan nyata masyarakat luas, maka kesalahan atau kegagalan menentukan calon-calon yang dianggap tidak mewakili kepentingan public akan menjadi kerugian besar bagi seluruh masyarakat.

Jika di zaman masa awal demokrasi termasuk dalam masa lima puluh tahun yang lalu misalnya keterpilihan seorang wakil politik masyarakat bahwa ideologi partai politik sebagai satu-satunya ukuran determinan penentuan perwakilan politik, dalam era dewasa ini justru mengalami pembaharuan sangat signifikan ketika ideologi partai politik justru hampir ditinggalkan di seluruh dunia. Ideologi politik menjadi tidak terlalu berpengaruh lagi, bahkan sejumlah partai yang saling bersaing pun cenderung memiliki ideologi yang sama. Lalu apa yang paling menentukan?

Ternya yang jauh lebih menentukan adalah kehadiran figure politik yang sudah terbukti menjadi wakil yang layak terandalkan sebagaimana dipikirkan oleh Alan Ware. Bahkan kehadiran langsung pihak yang diwakili di lembaga-lembaga negara tersebut jauh lebih penting dibandingkan sekedar menitipkan kewenangan kepada wakil yang salah sebagaimana dimaksudkan oleh Anne Philips. Namun tentu saja pengaruh primordialisme politik masih menjadi tantangan sangat serius sebagaimana dimaksudkan oleh Clifford Geertz, termasuk politik identitas dalam pemilihan umum dalam konteks Indonesia yang cukup mencemaskan khususnya ketika isu-isu identitas agama dan isu suku memasuki wilayah politik sebagaimana dimaksudkan oleh Maswadi Rauf. Pentingnya nasionalisme dalam sistem perwakilan yang

mengandalkan figur politik menjadi format mendasar buku ini merumuskan Sistem Perwakilan Politik di Era Modern.

Sistem perwakilan politik dewasa ini tidak lagi sekedar membahas tentang struktur, kelembagaan, jenis jenis sistem perwakilan, tetapi lebih membahas substansi perwakilan politik. Susbtansi sistem perwakilan mengandalkan kualitas dari wakil yang menjadi pilihan utama rakyat sebagai pemilih yang paling menentukan keterpilihan seorang wakil. Keterwakilan politik dewasa ini telah berubah dari apa yang menjadi format keterwakilan politik yang terjadi dalam beberapa dekade di masa lalu.

Pola umum yang selalu dibahas dalam buku-buku Sistem Perwakilan Politik yang selama ini hadir adalah memuat tentang sejarah sistem perwakilan, jenis-jenis lembaga, format-format sistem legislative atau presidensial di Inggris, Amerika, dan Eropah pada umumnya, dan bentuk-bentuk tekhnis lainnya. Buku ini berbeda dari buku-buku yang selama ini terbit. Buku ini justru tidak membahas mendalam sistem-sistem itu lagi karena sudah terlalu banyak dan sudah menjadi isu yang tidak mendapat pembaharuan berarti sejak hampir 200 tahun terakhir. Buku ini sangat berbeda dari semua buku-buku sebelumnya tersebut, karena buku ini lebih melihat bagaimana formasi atau upaya perwakilan politik bisa dihadirkan di era modern dewasa ini.

Seri Sistem Perwakilan Politik 1:

BAB 1
KONSEP DAN PENGERTIAN SISTEM PERWAKILAN POLITIK

1. Pengantar

Kehidupan politik menggunakan system perwakilan politik sesungguhnya sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu dalam kehidupan dimasa Yunani Kuno. Dimulai dengan demokrasi yang dicoba dipraktekkan di masa purba dalam kehidupan di negara-negara polis Yunani yang tentu format demokrasi dan perwakilan yang dilakukan sangat berbeda dengan praktek demokrasi yang saat ini dipraktekkan di seluruh dunia dewasa ini. Perkembangannya baru muncul puluhan abad kemudian di Eropah setelah lahirnya kesadaran baru yang menandai munculnya zaman pencerahan *(aufklarung)* di Abad Pertengahan.

Masa-masa kegelapan *(the dark ages)* yang meliputi seluruh dunia selama puluhan abad perlahan tergantikan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang menandai perlahan tergesernya masa-masa perbudakan dan kekuasaan tirani kerajaan dengan dua kekuasaan dalam satu pedang tunggal antara Imperium (Kaisar/Caeser) dan Gereja (Paus/Papa) dengan sebutan *Caecasropapisme*. Beberapa abad kemudian, demokrasi bertumbuh subur di daratan Eropah dan di masa-masa akhir abad ke-18 hingga menuju ke pertengahan abad ke-20, demam demokrasi melanda hampir seluruh dunia.

Termasuk negara-negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme, termasuk Indonesia.

2. Demokrasi Yunani dan Keruntuhannya

Demokrasi Athena merupakan suatu pelaksanaan demokrasi langsung, yaitu bahwa orang tidak memiliki perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka, melainkan masyarakat langsung memberikan suara untuk menentukan kebijakan. Kisah itu dimulai dengan berakhirnya pemerintahan Hippias yang kekuasaan tiran, digantikan oleh Kleisthenes (lahir 570 SM) dari keluarga Alkmaeonid. Kleisthenes terkenal karena mereformasi konstitusi Athena kuno dan menetapkan dasar bagi demokrasi Athena pada tahun 508/7 SM, sehingga para sejarawan sering menyebutnya sebagai "Bapak Demokrasi Athena." Dia juga disebutkan meningkatkan kekuasaan majelis Athena dan mengurangi kekuasaan para bangsawan Athena. Kleisthenes tidak menghendaki Athena kembali dipimpin oleh tiran. Di benak Kleisthenes terjadi pemutarbalikan pola pikir dari yang selama ini segala sesuatu muncul dari kebijkan para penguasa, maka untuk kali ini harus diubah sebaliknya. Kewenangan sepenuynya, menurut Kleisthenes harus diserahkan sepenuhnya ke masyrakat luas sebagai pemilik kedaulatan itu, termasuk mengubah kebijakan-kebijkan yang tidak mereka kehendaki. Proses itu akan dapat dijalani tanpa melalui sarana perang tetapi cukup dengan menampung apa ang dipikirkan dan diharapkan oleh warga negara.

Dalam gambaran Demokrasi Athena, terlihat bahwa para laki-laki yang sudah berusia matang dan dianggap dewasa menjadi pihak yang paling menentukan untuk mengambil kebijakan kebijakan yang dianggap perlu. Di dalam pertemuan pertemuan besar denga jumlah yang

terkadang sampai ribuan orang, para warga berjenis kelamin laki-laki dan sudah dianggap dewasa melakukan pertemuan Majelis atau Ekklesia. Biasanya mereka bertemu di senbuah bukit bernama bukit Pnyx yang ada di daerah Athena. Ke dalam pertemuan tersebut tidak boleh dihadiri baik oleh kam perempuan, apalagi oelh para budak dan anak-anak, termasuk orang orang asing. Yang bisa hadir hanya penduduk setempat yang asli dengan jenis kelamin laki-laki dan tentu saja sudah dewasa. Penetapan keputusan hanya boleh dilakukan jika sudah berkumpul sekitar enam ribu kalangan pria di Ekklesia. Dalam penjadwalan yang umum, pertemuan atau rapat tersebut diadakan rata-rata sekitar satu bulan sekali kecuali dalam hal-hal tertentu terjadi yang darurat seperti ancaman perang, atau kelaparan dalam negeri, atau bencana alam.

Dalam mengelola urusan pemerinthan kuno Athena, rakyat memilih sejumlah pejabat yang dianggap layak untuk memimpin mereka dalam urusan dan kebutuhan sehari-hari. Beberapa pihak bisa disebut misalnya pemilihan terhadap Sembilan orang yang akan ditempatkan sebagai archon. Para Arkhon ini bertugas dalam urusan-urusan keagamaan yang dipekerjakan untuk mempersiapkan kurban-kurban keagamaan. Selain itu dalam rapat yang diikut oleh para peserta siding yang sama juga dipilih sejumlah pemimpin perang yakni para strategis atau para jenderal yang menjadi ahli strategi perang dengan jumlah cukup sedikit yakni hanya sejumlah puluh orang saja yang dipilih secara bergiliran sesuai keahlian masing-masing. Sejumlah nama strategis yang sungguh terkenal dan membekas dalam sejarah Yunanti antara lain bisadisebut seperti nama-nama Alkibiades, Themistokles, dan Perikles. Namun ketika terjadi perang

antara Sparta melawan Athena beserta sekutu masing-masing yang disebut dalam istilah Perang Peloponnesos (431-404 SM), kesulitan besar jsutru dialami oleh Yunanti karena sangat mengandalkan demokrasi nya yang melelahkan, penuh diskusi panjang dan kesulitan mengambil keputusan. Akibatnya pada 336 SM, hamper seluruh negara kota yang berada di Yunanti jatuh ke tangan pemerintahan dan kekuasaan asing oleh kekalahan besar dan berada di bawah kewenangan pemerintahan Makedonia.

Negara kota di Athena semakin lemah dan terus menerus mengalami kekalahan perang dengan negara-negara dan kekuasaan di sekitarnya oleh karena mengandalkan demokrasi dengan diskusi diskusi yang panjang dan setiap orang dianggap memiliki kewenangan yang sama antara yang berpendidikan tinggi dengan yang sama sekali tidak bersekolah, antara yang pintar pemikir dan filsuf dengan para tukang batu mulai mengalami kekalahan atas Sparta. Beberapa orang pemikir kenegaraa saat itu yakni paa filsuf yang dianggap abadi pemikirannya hingga saat ini seperti Sokrates dan Plato, merasa bahwa Athena harus meninggalkan demokrasi dan kembali menerapkan oligarki. Kekalahan terjadi karena terlalu banyak diskusi menghadapi perang, Ketika setiap orang, baik petani, buruh bangunan, pekerja di pasar dan masyarakat tidak terdidik lainnya sama hak dan suaranya dalam rapat di Ekkelsia untuk menentukan keputusan strategi apa yang akan digunakan dalam perang, apakah perang perlu diadakan atau tidak, dan diskusi panjang bertele-tele apakah kekuatan perang Yunani mampu menghadapi Sparta atau tidak. Ketika diskusi belum rampung, perang sudah di depan mata.

Kelemahan terbesar dari praktek demokrasi langsung di Athena adalah pelibatan keputusan rakyat tidak terpelajar Athena menghukum mati Sokrates karena pemikirannya dianggap meracuni kaum muda. Sokrates dipaksa meminum racun yang dia tahu sendiri bahwa itu akan mematikannya. Lewat sebuah teori logika berpikir *Argumentum Ad Misericordia* (memohon belas kasihan), Sokrates memohon kepada hakim untuk membatalkan keputusannya, namun permintaan Sokrates ditolak, dan Sokrates mati dengan meminum racun. Demokrasi Athena benar benar berakhir ketika raja Phillipos dari Makedonia tahun 300-an SM menyerang Athena yang membuat kota itu benar-benar jatuh ke tangan kekuasaan asing.

3. Lahirnya kembali Demokrasi

Gagasan akan lahirnya Kembali demokrasi dimulai dari munculnya kekaguman pertama pada akal budi manusia sejak Zaman Skolastik hingga Abad Pertengahan (abad V – XV). Dimasa ini bermunculan tempat-tempat belajar di biara-biara Gereja berupa Skolastika. Jika dirunut dalam sejarah perkembangan hingga ke Abad XII, bisa ditemukan bahwa Lembaga-lembaga yang mengasuh Pendidikan di wilayah maju Eropa sebahagian terbesar ditangani oleh kalangan terdidik dari pihak Gereja yakni yang dikelola oleh kalangan rahib-rahib atau biara-biara. Perubahan kemudian muncul Ketika dalam perjalanan waktu wilayah pendidikana tersebut mulai melepaskan diri dari keterikatan dengan institusi Gereja dan secara mandiri mulai menunjukkan otonominya dengan membangun sejumlah universitas yang terlepas dari kewenangan tunggal pihak Gereja dan Biara. Sejumlah universitas bisa misalnya disebut seperti Universitas Salerno yang ada di kota Napoli Italia yang dikenal sebagai salah satu

universitas yang berdiri di generasi pertama sebelum universitas lain muncul dengan bidang ilmu mengacu pada urusan Kesehatan yakni studi-studi kedokteran. Rasionalitas manusia membawa manusia mampu berpikir untuk melepaskan diri dari kekuasaan feodalisme di masa masa kegelapan (dark ages), ketika Gereja dan raja-raja menjadi pemilik lahan/tanah dan masyarakat menjadi buruh atas tanah mereka sejak tahun 300 SM hingga tahun 1600 M.

Berbeda dari demokrasi langsung *(direct democray)* di masa Athena, demokrasi yang dipikirkan di masa kemudian ini adalah demokrasi secara tidak langsung *(indirect democracy)*. Demokrasi tidak langsung menjadi pilihan karena faktor-faktor seperti luasnya suatu wilayah negara, populasi penduduk yang sangat cepat, makin sulit dan rumitnya masalah politik dan kenegaraan, serta kemajuan ilmu dan teknologi merupakan persoalan yang menjadi kendala untuk melaksanakan demokrasi langsung pada era globalisasi sekarang.

Kisah demokrasi tidak langsung secara ringkas bisa dijelaskan demikian. Di awali di Inggris Ketika par araja dan bangsawan masih sangat bergaya hidup feodal sebagai pemilik lahan pertanian yang menguasai seluruh lahan pertanian milik warga. Dalam suatu kesempatan, Raja membutuh para penasehat baik dalam urusan kenegaraan maupun dalam urusan-urusan pajak rakyat termasuk dalam urusan lahan pertanian. Lembaga ini kelak menjadi permanen dengan istilah *''Curia Regis''* yangdalam masa kemudian dikenal dengan nama *House of Lords*.

Rakyat kebanyakan termasuk kalangan menengah kerap menjadi menjadi korban kebijakan raja untuk menaikkan pajak, membuat rakyat semakin berani menuntut perlunya ada wakil mereka yang

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat ketika raja harus membuat kebijakan menaikkan pajak rakyat dan kebijakan pemeritahan yang langsung mengenai diri mereka. Para wakil itu akan menjadi tempat raja meminta pendapat dan keterangan sebelum sebuah kebijakan dibuat. Perjuangan kalangan ningrat di dalam *house of lord* yang didukung oleh para rakyat dan kaum menengah membuat kaum ningrat mendapatkan kemenangan. Sejak saat itu pula kedudukan rakyat dan kaum menengah menjadi kuat. Sebagai bagian dari perwujudan agar terbentuk perwakilan rakyat maka lahirlah apa yang disebut *Magnum Consilium* yang terdiri dari para wakil rakyat yang akhirnya disebut *House of Commons* sampai sekarang.

Perkembangan selanjutnya, *House of Commons* mempunyai kekuatan yang semakin bertambah. Mereka dapat membebas tugaskan para menteri (perdana menteri) yang tidak mereka sukai untuk turun dari kekuasaan,

4. Peletak Dasar Sistem Perwakilan

Pokok-pokok perwakilan politik mendasari seluruh pemikiran tentang sistim perwakilan politik. Perlu kiranya untuk melihat gagasan dan pemikiran dasar dari pemikir demokrasi dan sistim perwakilan politik di masa-masa awal Abad Pertengahan hingga masa menjelang modern, yang pemikiranya hingga saat ini sangat relevan untuk didiskusikan. Keempat tokoh dimaksud adalah: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau. Keempatnya memiliki kekayaan pemikiran yang hingga saat ini menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai, khususnya dengan pemikiran JJ Rousseau.

Tanpa menghilangkan hormat dan kekaguman kepada para pemikir/filsuf sistim perwakilan politik lain sebelum dan sesudahnya kemudian, sampai sekarang pemikiran

keempat filsuf ini menjadi bahan diskusi sangat menarik karena menjadi realitas dan praktek bernegara yang berjalan di seluruh belahan dunia, baik di Eropah, Amerika, Afrika, bahkan di Asia termasuk di Asia Tenggara.

a. Perwakilan Politik menurut Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) menggambarkan pemikirannya dengan sosok bernama "Leviatan". Dasar berpikir bagi Hobbes adalah bahwa proses sosial yang terjadi pada setiap manusia memaksanya untuk terikat secara sosial sebab hanya dengan keterikatan secara sosial tersebut maka seluruh kepentingan pribadi masing-masing bisa saling terpenuhi satu usama lain. Tidak boleh ada manusia yang hidup seorang diri tanpa berurusan dengan manusia lain. Kesempuranaan menusia secara sosial justru ketika manusia itu berurusan dengan sesame manusia lain satu sama lain.

Kanal itu ada dalam bentuk Majelis (dewan perwakilan) sebagai bentuk sejati penyerahan hak dan kekuasaan manusia untuk memerintah dirinya sendiri dalam sebuah komunitas bersama (politik). Namun demikian, majelis pun harus dikenakan syarat yaitu ia harus menyerahkan hak kekuasaannya pada manusia-manusia yang telah memandatkannya, apabila terjadi perusakan moral majelis.

Hobbes mendasari pemikiran perwakilan politik itu dengan melihat bahwa perlu adanya perwakilan politik yang sifatnya harus dihormati karena kekuasaannya yang kuat bahkan jika dimungkinkan harus absolut. Lembaga itu menjadi sangat kuat dan bersifat mutlak karena kewenangannya diikat oleh sebuah perjanjian antar manusia (perjanjian sosial). Perjanjian ini mengisyaratkan bahwa setiap orang menyerahkan hak-

hak dan miliknya kepad kekuasaan perwakilan yang bersifat absolut tersebut. Karena sifatnya yang berciri mutlak dan sangat kuat, maka karakter penguasa itu oleh Thomas Hobbes digambarkan mirip dengan kekuasaan binatang buas di lautan yang luas yang merajai seluruh wilayahnya dengan sangat bengis dan kuat. Thomas Hobbes menggambarkannya sebai sejenis binatang raksasa bernama "Leviathan". Kewenangan tunggal yang dimiliki seorang penguasa sejenis penguasa raksasa bernama Leviatan itu berciri tunggal dan tidak dibagi ke siapa saja pun, sementara pengikut atau bawahannya semua menjadi pelayan atau turut mematuhi seluruh perintah dan gagasan dasar dari si "Leviatan" tersebut.

Pemikiran Hobbes atas terbentuknya negara didasari pada pikiran awal bahwa manusia tidaklah bersifat sosial. Manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri. Kecenderungan ini membuat manusia bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain: *homo homini lupus*! (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Keadaan ini mendorong terjadinya "perang semua melawan semua" *(bellum omnium contra omnes)*. Inilah "keadaan alamiah" saat belum terbentuknya negara.

Kekhawairan terbesar adalha jita terjadi perang terus menerus antar sesama umat manusia, bahkan jika sampai terjadi perang satu sama lain menghadapi semua manusia lain juga. Kekhwatiran tersebut memunculkan gagasan untuk meminimalisir perang yang akan sangat mengancam umat manusia sehingga sangat dibutuhkan menciptkan perjanjian diantara sesama umat manusia itu sendiri. Perjanjian itu melahirkan sebuah institusi bernama negara sehingga setiap orang harus mematuhi

institusi bernama negara tersebut, dan negara memiliki kewenangan yang harus dituruti pula oleh setiap orang yang mengikatkan diri di dalamnya.

Negara memiliki kewenangan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, suatu status yang muncul sebagai hasil dari perjanjian antar-warga negara. Dalam perjanjian membentuk negara, setiap warga negara menyerahkan semua hak mereka kepada negara. Namun, negara sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun atas warganya, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab atas rakyat.

Maka bagi Hobbes, negara berada di atas seluruh warga negara dan berkuasa secara mutlak, persis seperti sosok "Leviathan", binatang buas yang digambarkan Thomas Hobbes yang berada di lautan dan menguasai segala- galanya. Atas kewenangan itu, negara berhak menuntut ketaatan mutlak warga negara kepada hukum-hukum yang ada, serta menyediakan hukuman bagi yang melanggar, termasuk hukuman mati. Itulah alasan sehingga warga negara akan menekan hawa nafsu dan insting untuk berperilaku destruktif. Akibatnya, warga negara akan memilih untuk patuh kepada hukum karena memiliki rasa takut dihukum mati. Hilangnya kebebasan warga negara terhadap negara adalah harga yang harus dibayar jika semua orang ingin hidup dalam ketenteraman, keteraturan, dan kedamaian.

Menurut Hobbes, pada dasarnya dalam kondisi alamiah, sebelum terbentuknya suatu negara dan kekuasaan superior, manusia cenderung bertindak sebebas mungkin dan berusaha mempertahankannya dengan cara menguasai orang lain. Kehendak untuk dapat mempertahankan kebebasan mereka pada dasarnya didorong oleh kehendak mereka untuk

menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dengan adanya persaingan untuk dapat menyelamatkan diri mereka masing-masing, konflik antar manusia tidak dapat dihindari. Oleh karena itu menurut Hobbes, dalam kondisi manusia secara alamiah tidak ada yang namanya kepemilikan, keadilan ataupun ketidakadilan. Yang ada hanyalah peperangan, kekuatan dan penipuan dalam usaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Keinginan atau hasrat yang dimaksud Hobbes adalah kekuasaan, kekayaan, pengetahuan dan kehormatan, sementara keengganan yang dimaksud adalah hidup sengsara dan mati. Maka setiap anggota masyarakat akan saling membuat kesepakatan untuk melepaskan hak-hak mereka dan kemudian disalurkan pada beberapa orang atau lembaga untuk dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan benturan.

Semakin kompleksnya persaingan antar manusia akan semakin meningkatkan keengganan manusia untuk sengsara dan mati. Sehingga pada kondisi alamiah, manusia dengan akalnya berusaha untuk saling menghindari peperangan yang terjadi sebagai akibat benturan. Selanjutnya yaitu kekuasaan yang tertib dan kuat adalah kekuasaan yang berada di bawah satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyatnya. Setelah rakyatnya memberikan hak-haknya pada sang penguasa, rakyat tidak dapat lagi menarik hak tersebut apalagi mendapatkan hak tersebut kecuali sang penguasa memberikannya. Dengan kondisi yang demikian, rakyat akan tertib karena takut akan kekuasaan di luar kontrak yang dijalankan karena rakyat tidak dapat mengganggu-gugat. Kondisi inilah yang sebenarnya oleh Hobbes disebut sebagai kontrak sosial.

Tulisan-tulisan Hobbes, khususnya "Leviathan", sangat memengaruhi seluruh filsafat politik dan filsafat moral di Inggris pada masa-masa selanjutnya. Di Eropa Daratan, Hobbes juga membawa pengaruh kuat. Hobbes juga merupakan salah seorang filsuf, jika bukan yang pertama, yang amat berpengaruh dalam perdebatan antara kehendak bebas dan determinisme.

b. Perwakilan Politik menurut John Locke

Karakter mendasar setiap orang adalah ketika setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain dengan manusia lainnya. Walaupun kepentingan itu berbeda, namun setiap orang mengharapkan terdapat perwujudan setiap kepentingan itu dalam wujdunya yang konkrit sehari-hari sesuai dengan harapan dari setiap orang tersebut. Maka semua niat-niat itu perlu disampaikan, termasuk keinginan mendapatkan rasa nyaman dengan mendapatkan perlindungan dirinya sendiri. Persoalan mendasar, Ketika kuantitas dan ersentase masyratat semakin membesar dari sebelmnya dengan luas wilayah yang semakin tak terjangkau dengan mudah, tentu saja kehendak-kehendak yang muncul itu tidak akan begitu mudah untuk dipenuhi keinginan setiap orang per orang. Untuk kepentingan itulah setiap manusia bersama dengan manusia-manusia lain membentuk kehidupan sosial bernama ''masyarakat'' *(society).* Kehadiran komunitas sosial bernama "masyarakat" itu dibentuk berdasarkan perjanjian bersama.

John Locke (1632-1704) mengungkapkan pikiran keterwakilan politik dalam buku ''Two Treatise On Government'' yang terbit tahun 1690, melihat kekuasaan "masyarakat'' sebagai *suprame of power*. Manusia-

manusia menyerahkan kekuasaan kepada ''masyarakat'', namun manusia-manusia bisa menarik perjanjian yang disepakati apabila terjadi pelanggaran. Artinya kekuasaan tertinggi masih terletak pada rakyat secara keseluruhan, karenanya dibuatlah undang-undang/hukum untuk mengawasi tugas ''masyarakat''. Setiap anggota ''masyarakat'' terikat oleh ketentuan-ketentuan yang melarangnya berbuat sewenang-wengan dan tidak boleh menyerahkan hak legislatif yang diperolehnya dari rakyat keseluruhan kepada pihak lain.

Kekuasaan politik yang diwakilkan rakyat kepada *suprame of power* (masyarakat) adalah berdasarkan kepada kepercayaan *(trust),* basis utamanya adalah kepercayaan rakyat terhadap penguasa untuk melindungi rakyat. Kemungkinan munculnya *absolutisme* akan dapat dihindari apabila ''masyarakat'' dan konstitusi membuat batasan kewenangan yang dimiliki oleh penguasan politik, karena pada hakekatnya kekuasaan adalah suatu perjanjian sosial.

John Locke melihat sistim perwakilan politik lewat pembagian kekuasaan *(separation of power)* dalam Negara untuk mencapai keseimbangan. Kekusaan tersebut, yaitu: kekuasaan legislative untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan *federative* yang berurusan terkait perang dan poerdamaian, upaya membuat kerjasama berupa aliansi di badan-badan luar negeri.

Pemikiran John Locke muncul sebagai upaya perlawanan terhadap kewenangan yang bersikap absolut dari kekuasaan para raja yang memerintah terhadap warga negaranya. Dalam konteks demikian, menurut John Locke, menjadi sangat penting supaya setiap

manusia mengikatkan dirinya satu sama lain dengan setiap orang yang saling memiliki kepentingan dan kebutuhan yang mungkin sama bahkan sangat mungkin berbeda untuk mendapatkan kebutuhan mendasrnya terutama rasa aman dan kebutuhan mendasar lainnya untuk dipenuhi. Upaya untuk itu adalah melakukan perjanjian social antara manusia satu sama lain yang oleh John Locke sebut dengan istilah "social contract".

Kontrak ssosial menjadi satu-satunya jalan utama bagi setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-hak dasarnya. Keterikatan setiap orang dengan kontrak sosial yang disepakati membuat setiap orang tidak sembarang lagi mengganggu kepentingan dan kehidupan manusial lainnya. Dan sebaliknya tidak menjadi begitu mudah lagi memaksa mendapatkan hak-haknya dari upaya merugikan hak-hak orang lain. Yang terjadi adalah setiap orang akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kewenangan hidup masing-mnasing tanpa membaut setiap orang yang lain menjadi terganggu.

Dalam system bernegara kemudian, John Locke melalui kontrak sosial ini meletakkan fungsi-fungsi negara dalam beberapa bidang, antara lain: *pertama*, fungsi pembentukan undang-undang (legislating) yang dinamainya dengan "legislative powers". *Kedua,* fungsi dalam rangka pembuatan keputusan yang dianggapnya bukan sebagai kekuasaan (*power*) sehingga tidak perlu melebih-lebihkan kewenangan tersebut sebagai sebuah keputusan karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional.

Fungsi k*etiga,* adalah penggunaan upaya kekuataan internal untuk mengupayakan pelaksanaan undang-undang. Artinya kekuatan internal pun layak dipakai

sejauh kehendak supaya pelaksanaan undang-undang bisa dimaksimalkan demi kepentingan yang oleh negara dianggap sebagai sebuah keharusan. Fungsi *keempat,* adalah kewenangan negara untuk menggunakan kekuatannya ketika ada ancaman atau upaya lain perebutan kekuasaan oleh pihak luar terhadap kepentingan dalam negeri yang mengancam kehidupan masyarakat luas dalam negeri. Kewenangan ini muncul sebagai upaya negara melindungi kedaulatannya dari kemungkinan ancaman atau agresi yang dilakukan oleh pihak asing. Locke menyebutnya sebagai *federative powers*.

c. Perwakilan Politik menurut Montesquieu

Montesquieu (1689-1755) menuliskan pemikiran sistim keterwakilan politiknya dalam bukunya *"Del L'esprit Des Lois"*. Kekuasaan itu berfungsi untuk menampung, membicarakan dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak serta merumuskan peraturan dalam Lembaga bernama ''legislatif''. Maka mutlak perlu dibentuk legislatif sebagai perwakilan rakyat agar pembicaraan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak akan bisa dipenuhi, tanpa perwakilan, maka yang terjadi adalah suara minoritas *(minority sounds)* hal yang mudah ditaklukkan oleh mayoritas kekuasaan.

Dewan rakyat (legislatif) merupakan mediator antara rakyat dan penguasa, menjadi komunikator dan agregator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Realitanya, masyarakat terdiri atas kelas utama yaitu rakyat pada umumnya dan kaum bangsawan. Karenanya dalam lembaga perwakilan hurus dibagi dalam dua kamar (chamber) yaitu rakyat umum dan kaum bangsawan. Masing-masing mempunyai hak menentukan pendapat

(*veto)* yang dibuat tiap kamar. Prinsipnya, masing-masing kekuasaan politik haruslah dibuat terpisah *(trias politica)* dan masing-masing memiliki wewenang untuk saling mengawasi. Dalam pengertian ini, pemegang kekuasaan tidak akan berada di satu tangan yang tunggal yang memegang sepenuhnya kekuasaan, tetapi justru dibagi dan dibedakan dengan berbagai-bagai pihak, sehingga kekuasaan tersebut berada di tangan sejumlah pihak. Kewenangan yang demikian sangat memungkinkan bahwa kebijakan tunggal tidak akan diturunkan oleh satu orang yang lalu dipaksakan untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa diberi kewenangan maupun untuk koreksi dan melihat perbaikan yang mungkin. Bahkan jika berada di satu tangan yang tunggal sangat dikhawatirkan akan muncul kewenangan tunggal yang kerap berujung absolut dan menjadi kesewenang-wenangan. Jika prinisip absolut sudah menjadi wujud konkrit maka tidak akan ada lagi koreksi termasuk jika terjadi kesalahan dan ketidaktahuan, maka tidak akan ada upaya perbaikan. Termasuk jika terdapat kekeliruan dan ketidakmengertian akan maksud dari si pemberi perintah, maka akan tertututp kemungkinan untuk mendapatkan penjelasan.

Dalam konteks pikiran Montesquieu ini dibuka peluang adanya pembagian kekuasaan secara jelas dan seimbang, yakni ada pihak yang mengusulkan dan melakukan kebijakan, tetapi selalu ada control dari pengawasan yang melekat dari pengambilan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan ada kewenangan lembagal ain untuk melakukan upaya yang adil jika terjadi penyelewengan dengan kewenangan memeriksa dan mengadili siapa saja pihak-pihak pelaksanaan yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahaan. Upaya koreksi demikian menjadi sanga perlu termasuk memberi

hukuman yang setimpal bagi siapa saja yang melakukan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.

Bagi Montesquieu, keadilan hanya akan tercermin dari pembagian kekuasaan tersebut. Kekuasaan tersebut menjadi sangat benar dan seimbang ketika ketiganya berjalan secara seimbang dan tidak saling mendominasi antara yang satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Setiap kekuasaan berdiri sendiri dan saling memberi koreksi baik antara pihak yang melaksanakan kebijakan yakni eksekutif maupun dengan pihak yang bertugas dengan kewenangan mengawasi pelaksanaan kebijakan dimaksud (legislative) dan penegakan hukum yang kuat atas seluruh upaya yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan negara. Maka bagi Montesquieu, kehadiran lembaga ketiga yakni lembaga peradilan menjadi sangat penting untuk upaya penegakan hukum yang kuat dan benar. Hukum merupakan satu-satunya upaya yang menunjukkan keadilan dalam arti sesungguhnya, sebab dengan peradilan dan penegakan hukum yang kuat keadilan akan diperoleh oleh setiap orang sesuai dengan perilaku dan perbuatannya. Maka lembaga peradilan yang menjadi pihak yang berwenang menegakkan hukum yang benar dan kuat akan menjadi pihak yang memberi keputusan yang adil bagi setiap pihak yang dianggap melakukan penyelewengan dari kekuasaan negara yang dipegangnya. Keadilan bersifat mutlak sebagai hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap orang, dan keadilan itu bagi Montesquieu hanya akan diperoleh dari hukum yang ditegakkan secara kuat dan bermartabat.

Montesquieu melihat bahwa penegakan hukum sebagai satu-satunya jalan terakhir yang akan menjadikan terwujudnya keadilan bagi setiap orang, pengalaman Montesquieu dengan kerajaan di Perancis yang sewenang-

wenang di masa hidupnya membuat Montesquieu sangat mengagungkan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan bermartabat bagi seluruh warga negara. Dalam sebuah pandangannya yang mencurigai kebebasan setiap penguasa untuk menciptakan ketidakadilan, Montesquieu berpandangan bahwa sesungguhnya manusia itu berkecenderungan untuk bertindak tidak adil. Alasanya sederhana karena setiap orang mengutamakan kepentingan dirinya masing-masing dan memuaskan apa yang perlu bagi dirinya, sehingga kemungkinan kekuasaan dan kesewenang-wenanan yang hamper pasti tidak adil akan sangat mungkin muncul. Karena itu penegakan hukum menjadi satu-satunya jalan utama untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak, termasuk kontrol bagi pelaksanaan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan atas nama negara oleh Lembaga yang diberi kewenangan.

d. Perwakilan Politik menurut JJ. Rousseau

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) menuliskan pemikiran Sistem Keterwakilan Politik dalam bukunya ''The Social Contract''. Pemikiran dasarnya dimulai dengan paham bahwa manusia pada awalnya berada dalam situasi keadaan alami (*State of Nature*) sebagia wujud awal dari manusia itu sejak awal. Yang terjadi dalam siatuasi alami tersebut adalah adanya prinsip bebas dari setiap orang melakukan apa saja yang menurutnya terbaik dan penting bagi dirinya sendiri. Di benak Rousseau bahwa dalam keadaan alamiah dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki kehendak yang memungkinkannya bebas melakukan apa saja yang menurutnya benar seturut kepentingan dan kehendaknya, walaupun kehendak dan

kepentingan itu sesunggunya sangat mungkin bertentangan dengan harapan dan kehendak manusia lainnya. Dalam konteks inilah muncul kemungkinan untuk bertikai dan saling memperebutkan apa yang perlu untuk dirinya dari sumber-sumber yang sama bahkan memungkinkan untuk merampas kemungkinan hak yang dimiliki oleh orang lain.

Dibahasakan dengan sederhana bahwa manusia itu hidup dalam situasi polos/lugu apa adanya dan mencintai dirinya sesuai apa yang perlu untuk dirinya secara apa adanya. Manusia itu tahu melakukan apa yang terbaik untuk dirinya, dia tahu apa yang terbaik itu adalah untuk dirinya dan terbaik untuk dirinya itu adalah juga terbaik untuk orang lain. Pemikiran yang dianggap akan hadir dalam diri setiap orang pada dirnya sendiri tanpa perlu diperdebatkan.

Pikiran Rousseau tentang masyarakat dan negara menggambarkan semangat kembali ke alam. Kebebasan sipil dan soal milik dalam persekutuan ini dijamin oleh kemauan bersama. Negara berdaulat karena mandat dari rakyat, negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi dan menjaga keamanan maupun harta benda. Negara harus selalu mewujudkan *Volonto Generaale* atau *General Will* (Kehendak Umum). Prinsip dasar dari *Volonto Generale* adalah adanya pengakuan dirinya sebagai individu-individu yang bermartabat atas dirnya dan penghormatan atas dirinya itu otomatias akan menjadi pemikiran setiap orang. Karena setiap orang memikirkan juga apa yang bermartabat dan perlu untuk dirinya sehingga semua kepentingan manusia adala tentu semua orang lain memikirkan hal yang sama untuk diri setiap pribadi.

Maka penghormatan pada diri manusia pribadi itu tidak akan pernah terlepas dari upaya juga memikirkan apa yang terbaik menurut dirinya dan pasti juga setiap orang memikiran yang terbaik itu untuk dirinya. Maka kehendak umum itu adalah wujud dari setiap orang berpikir tentang kebaikan-kebaikan yang perlu untuk dirinya seniri. Kehendak Umum adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah kepada kepentingan bersama, kepentingan umum. Kehendak Umum (*Volonto Generaale)* tidak bisa salah karena merupakan standar hak sebenarnya kontrak Sosial.

Dalam *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) kita menemukan sumber tertinggi kekuasaan yang berdaulat dan kriteria yang tertinggi dari otoritas kedaulatan itu. Kehendak umum disaring dari kehendak semua melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara kepentingan-kepentingan khusus yang bertentangan satu sama lain saling meniadakan sehingga akhirnya tinggal *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) yang dikehendaki oleh semua. Maka posisi negara diletakkan sebagai wujud dan pengungkapakan dari apa yang sesungguhnya sebagai *Volonto Generaale* itu yang berasal dari para warga negaranya.

Karena negara mendapatkan wujudnya dalam bentuk Volonto Generaale yang berasal dari setiap orang manusia sebagai warga negara dari sebuah negara, maka bagi Rouesseau, bentuk pemerintahan dan negara yang ideal adalah bentuk negaa Republik. Dalam bentuk negara republic terdapat hukum yang mengatur tanpa mengurangi kebebasan setiap orang untuk melakukan apa yang terbaik menurut dirinya dan otomatis akan yang terbaik juga untuk sesamanya. Loyalitas pada diri sendiri itu berakhir pada loyalitas pada negara secara mutlak

sehingga negara akan tahu persis apa yang terbaik bagi warga negaranya. Maka dalam negara tidak perlu persekutuan lain apapun entah dalam bentuk organisasi atau kemungkinan menghadirkan partai apapun tidak lagi patut karena negara lebih tahu apa yang perlu untuk kepentingan setiap orang. Loyalitas pada akhirnya harus diberikan oleh setiap pihak kepada sebuah institusi yang kuat dan formal bernama negara. Dan hanya ada satu instritusi resmi, yakni negara saja, sehinga institusi apapun di luar negara tidak diperkenankan untuk dibentuk dan dihadirkan. Menghadirkan institusi lain dalam negara sama artinya dengan menghadirkan pertentangan terhadap keberadaan negara. Rousseau menyebut bahwa bentuk negara yang benar dan patut didukung hanyalah bentuk negara berciri Republik sebab haya di sana terdapat pengakuan akan *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) itu. *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) itu berasal dari makna setiap orang memikirkan yang baik dan setiap pemikiran yang baik dari setiap orang itu adalah menjadi pemikiran negara dan menajdi negara itu sendiri. Maka tidak perlu ada perwakilan, setiap orang langsung berurusan dengan negara.

Dalam konteks ini akhirnya Rousseau bersikap bahwa terdapat upaya menghormati negara secara total dan setiap orang melepaskan dirinya dari kebebasan kebebasannya. Yang ada hanya satu yakni kebebasa negara menentukan yang terbaik bagi warga negaranya dan kebebasan individu perlahan-lahan menjadi tidak melekat lagi dalam dirinya. Paham kedaulatan rakyat total adalah negara adalah rakyat itu sendiri, pelanggaran tidak mungkin terjadi karena negara identik dengan rakyat. Maka dalam negara Rousseou tidak perlu ada institusi, mengingat negara sebagai *Volonto Generaale (*Kehendak

Umum), hanya dapat menghendaki apa yang dikehendaki semua, tidak mungkin hak warga negara dilanggar oleh negara.

Demokrasi langsung berpangkal pada manusia yang baik yang memang terus menerus bersedia dan berkesempatan untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik . Maka Rousseau mengecam usaha dagang dan industri, usaha yang berpangkal pada pencarian laba yang menyebabkan manusia kembali kepada kedudukannya sebagai budak. Karena perdaganganlah yang membuat manusia menjadi budak. Sistim perbudakan justru muncul dari perdagangan ketika ada orang mengumpul kekayaannya dan ada pihak lain yang diperas tenaga dan fisiknya. Itulah perbudakan.

Masalah Minoritas: *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) muncul dalam kehendak mayoritas, minoritas yang tidak sekehendak berarti pihak itu belum dapat membedakan antara kepentingan egois sendiri dan *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) yang sebenarnya juga kepentingan mereka dan karena itu sebetulnya juga mereka kehendaki. Minoritas memiliki mental yang belum memadai, mereka kurang rasional dan belum matang dalam kesadaran sebagai warga negara. Rousseau mengikat bahwa kehendak umum adalah kehendak mayoritas. Kepada minoritas yang belum menunjukkan kesadaran perlu diberi penerangan, penyuluhan. Siapa yang menolak untuk taat kepada *Volonto Generaale (*Kehendak Umum) akan dipaksa oleh seluruh masyarakat.

Hingga saat ini, pemikiran keempat filsuf politik yang sudah lama berlalu di atas mempengaruhi format sistim perwakilan yang berkembang hampir di seluruh dunia dalam sistim politik bernama demokrasi.

5. Format Sistem Perwakilan Modern

Pemikiran keempat tokoh, khususnya John Locke dan Montesquieu menjadi landasan format bernegara dalam bentuk pilihan politik demorkatis hingga saat ini hampir di seluruh dunia. Pembagian kekuasaan antara tiga Lembaga (eksekutif, legislative, dan yudikatif) menjadi corak yang dipakai di seluruh dunia bagi negara-negara penganut atau yang memilih demokrasi sebagai bentuk negaranya.

Dalam konteks di era modern saat ini, semakin mengerucut dalam bentuknya yang semakin kuat yakni salah satu dari dua bentuk-bentuk pemerintahan berciri demokratis, yakni keberadaan penguatan negara atas nama parlement yakni peran yang besar kepada parlemen dan partai politik dengan kepemimpinan berdasarkan kehadiran perdana Menteri sebagai kekuasaan eksekutif. Sementara di sisi lain adalah kehadiran presiden sebagai kepala eksekutif yang mengepalai sebuah pemerintahan. Dalam konteks modern saat ini keduanya dipilih oleh rakyat baik secara langsung dalam konteks pemilihan yang semakin marak di seluruh dunia saat ini, maupun dipilih secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti pernah dilakukan oleh Indonesia dimasa pemerintahan Orde Baru.

Tetapi setidaknya dua gaya kepemimpinan modern berciri demokratis yang mendominasi adalah sistem pemerintahan presidensiil dam system pemerintahan berciri parlementer, sebagai salah satu dari kedua nya menjadi pilihan dari negara-negara modern beradab yang memegang prinsip-prinsip demokrasi di zaman modern saat ini.

Sejumlah negara di dunia ada juga yang mengambil kombinasi keduanya seperti terjadi dalam format peritnahan yang terjadi di sistem semi presidensiil di

negara Perancis. Sementara sistem yang murni dari keduanya yakni murni presidensial dan murni parlementer dalam konteks demokrasi dunia saat ini cenderung mengacu pada format sistem pemerintahan yang berjalan saat ini di negara Inggris dengan format parlementer, serta di Amerika Serikat dengan format presidensiil. Dalam konteks Indonesia, pemerintanhannya mengikuti format pesidensiil, walaupun system pemilihan umumnya berbeda dari yang sedang berjalan di Amerika Serikat saat ini.

Jika mengacu pada siste sistem Presidensial, idelamisme yang selalu muncul adalah ketika sstem presidensial di selalu dilihat denga penekakan demokrasi dengan pengakuan akan sangat pentingnya penghormatan pada hak asasi manusia. Daam pendirian negara amerika sejak sangat awal sudah ditekankan oleh James Madison dan *founding fathers* Amerika lainnya bahwa hanya dengan meletakkan adanya kekuasaan yang terpisah dari satu kekausaa yang lain aka kemungkinan keadilan akan terwujud. Persis seperti pemikiran John Locke sebagaimana dijelaskan di bagian terdahulu buku ini.

Sementara terkait legislatif/parlemen, terdapat dua sistem parlemen yang berkembang dewasa ini, yaitu sistem unikameral (*unicameralism*) dan sistem bikameral (*bicameralism*). Sistem unikameral menempatkan kekuasaan terpusat dan terfokus pada salah satu unit kekuasaan, berbeda dengan sistem bicameral yang menempatkan adanya kekuasaan dala Lembaga perwakilan dalam dua kamar yang berbeda. Istilah lebih tekhnis disebut dengan kekuasaan di majelis rendah (*lower house*) di satu pihak dan kekuasaan di majelis tinggi (*upper house*) di pihak lain.

6. Penutup

Semua pemahaman tentang sistim politik di atas dalam konteks Sistem Perwakilan Politik mendapat wujud yang semakin kompleks dalam sistim perwakilan dewasa ini, khususnya Ketika isu ideologi partai yang menjadi satu-satunya ukuran perwakilan politik di masa-masa awal Abad ke-20, ternyata perlahan-lahan semakin ditinggalkan oleh pemilih. Dalam pemikiran politik Sistem Keterwakilan Politik yang digagas oleh Alan Ware berikut ini mengambarkan bagaimana ideologi yang diusung oleh partai politik semakin redup dan ditinggalkan oleh pemilihnya.

Lalu bagaimana keterwakilan politik warga di era modern sekarang ini jika ideologi partai politik tidak lagi menarik bagi para pemilih? Bab berikut akan menguraikannya dari sudut pandang ideologi politik, program partai politik, dan kehadiran figure politik.*****

BAB 2
FIGUR POLITIK, PROGRAM PARTAI, DAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK

1. Pengantar

Perbedaan mendasar dari sistim keterwakilan politik dalam dua puluh tahun terakhir dibandingkan dengan masa-masa awal Abad ke-20 adalah kebebasan masyarakat sipil untuk menentukan pilihannya karena pilihan politik semakin banyak tersedia. Masyarakat tidak lagi sekedar terpaku pada isu-isu primordial seperti suku, ras, agama, asal muasal, budaya, adat istiadat dan lain lain yang menjadi patokan pilihan politiknya, tetapi tersedia kemungkinan lain yang lebih menjanjikan bagi para pemilih. Pemilih tidak lagi sekedar berkutat pada isu-isu primordial seperti disebut di atas, tetapi sudah membuka diri dengan sejumlah kemungkinan pilihan yang tersedia.

Dua yang paling pokok di antaranya adalah pilihan warga ditentukan oleh kehadiran dan peran figur politik dan bagaimana partai mengemas program partai yang mampu mengundang simpatik para pemilih, selain tentu saja masih terdapat isu-isu ideologi partai untuk menentukan keterpilihan. Tiga pokok ini tetap menjadi alasan pemilih di seluruh dunia untuk menentukan pilihan politik bagi keterpilihan sebuah partai.

2. Kehadiran Figur Politik

Penentuan pilihan politik bagi seluruh masryakat pemilih hampir di seluruh dunia dewasa ini sudah mulai ditentukan oleh kehadiran sosok atau figure calon dalam politik. Terdapat pergeseran pemilihan dewasa ini untuk menentukan pilihan partai politik bagi para pemilih sebagaimana misalnya diutarakan oleh Alan Ware.

Menurut Alan Ware, dalam konteks kepartaian saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh public dan yang bisa diterima oleh public secara luas. Bahkan, ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari pemilih. Pada tataran penempatan kader, sering terbuka ruang untuk terjadinya perbedaan fenomena politik yang melatarbelakangi dan menentukan keputusan hasil akhirnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan dan adanya unsur kesamaan terkait peranan elit partai. Kemungkinan terjadinya variasi dalam proses penempatan calon legislative sebuah partai misalnya, tentu tidak bisa terlepas dari adanya faksi-faksi yang berkembang di organisasi partai. Bahkan dalam tataran lebih tinggi, tidak sedikit penentuan lokasi dan daerah pemilihan calon partai menjadi pertimbangan sangat serius bagi setiap partai politik. Terdapat kebutuhan bagi elit dalam mengendalikan jalannnya organisasi partai dengan alasan kestabilan internal dan menghindarkan terjadinya perpecahan.

Terkait dengan proses pencalonan kandidat-kandidat, Alan Ware menjelaskan bahwa ketika potensi individu yang layak jual ke tengah pemilih dan dianggap

mampu menaikkan suara partai politik ditempatkan sebagai prioritas, maka peranan partai tidak lagi menjadi dominan. Memang tetap perlu bagi partai untuk mensosialisasikan dirinya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana calon yang bersangkutan mampu memperkenalkan dirinya ke masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih.

Ketika kandidat tersebut sudah mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat maka tugas partai bisa melihat sebesar apa tingkat penerimaan masyarakat itu terhadap diri seorang calon. Artinya, selama tidak ada riak-riak penolakan entah melalui media atau ada kelompok masyarakat yang berusaha menolak calon dimaksud, maka calon tersebut tetap dimajukan oleh partai dan orang bersangkutan tidak terlalu direpotkan oleh kendala-kendala. Alasan partai politik menempatkan calon-calon di daerah pemilihan tertentu didasarkan oleh pertimbangan bahwa partai sudah sangat yakin kandidatnya dikenal dan mampu meraih dukungan pemilih secara maksimal. Persoalan partai untuk mensosialisasikan dirinya supaya pemilih memilih partai tersebut menjadi sangat minimal.

Alan Ware menjelaskan adanya riset yang menemukan bahwa ideologi partai itu tidak begitu penting lagi, tapi lebih penting adalah bagaimana partai itu bisa terpresentasikan untuk mampu mendapatkan orang-orang terpilih, lalu program-program yang diusung oleh orang-orang yang terpilih tersebut. Alan Ware melihat bahwa ideologi partai itu tidak begitu penting lagi sekarang, yang penting adalah bagaimana partai bisa mendapakan orang orang yang bisa menyumbangkan suara untuk partai, dan itu biasanya melalui program-program. Tentu saja dalam

hal ini adalah orang-orang yang bisa menaikkan suara partai untuk mendapatkan kursi di legislative.

Ada dua hal yang saling terkait mengenai masalah ideologi yang sudah mulai bergeser tersebut. *Perbedaan pertama* sebagaimana dikemukakan Alan Ware adalah bahwa partai-partai membuat perbedaan-perbedaan yang kontradiksi di mana partai-partai saling bertentangan yang tampak pada pemilih yang terkotak-kotak oleh ideologi menjadi sebuah pembeda yang sangat jelas. Alan Ware menjelaskan demikian,[1]

> *"The problems in trying to reduce the analysis of these parties ideologies to the spatial representation of their programmes are twofold. The parties may make quite different, and contradictory, appeals to different groups of supporters. The Peronist Party in Argentina, for example, had quite distinct left and right wings; its ideology could not be reduce to a single position on a spectrum."*
>
> ["Persoalan dalam upaya mereduksi analisa tentang ideologi-ideologi partai ini terkait keterwakilan spasial dari program-program ini bersifat ganda. Partai-partai mungkin menjadi sungguh berbeda dan berkontradiksi, menarik ke arah kelompok-kelompok yang berbeda. Partai Peronist di Argentina sebagai contoh, memiliki distingsi sayap yang sangat berbeda antara kiri dan kanan; ideologinya tidak dapat dikurangi terhadap suatu posisi tunggal pada suatu spektrum."]

[1] Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996), hlm. 21.

Penjelasan di atas menunjukkan ada perbedaan dari kelompok masyarakat atas adanya perbedaan ideologi yang diusung oleh partai. Ideologi berperan menjadi sesuatu yang menciptakan perbedaan. Contoh di Argentina dimana Partai Peronist memiliki perbedaan yang cukup kuat antara sayap kiri dan sayap kanannya. Ideologinya tidak bisa diminimalisasi untuk menempati satu posisi tunggal.

Tetapi walaupun perbedaan ideologi tersebut sudah mengakar dalam masyarakat, namun Alan Ware tetap mengikuti pandangan Arend Lijhpart tentang politik partai di negara berkembang, di mana diulangi lagi bahwa memang ideologi itu dalam inter relasi antar partai tidak kuat. *Perbedaan kedua* yang ditegaskan oleh Alan Ware terkait ideologi adalah bahwa berbeda dengan spectrum kiri dan kanan, dimensi lain adalah dimensi populisme dan dimensi nasionalis sebagai dimensi yang jauh berbeda dan bisa menjadi kabur dan tidak kelihatan. Alan Ware menjelaskannya demikian,[2]

> *"Unlike the classic left/right spectrum, populism and nationalism are dimensions that are far more likely to be revealed by a party's reaction to events than in any formal statement of intentions. The analysis of party programmes is necessarily that is biased towards uncovering the left/right dimension rather than other ones."*
>
> ["Tidak seperti spectrum kiri atau kanan klasik, populisme dan nasionalisme adalah dimensi-dimensi yang jauh lebih penting untuk ditampakkan melalui penyikapan partai terhadap

[2] *Ibid.,* hlm. 109.

peristiwa-peristiwa dari pada sekedar statemen formal apapun terkait dengan maksud partai. Analisa tentang program-program partai cukup penting yang bias ke arah dimensi kiri/kanan yang tak tertutupi lebih dari pada hal yang lain."]

Maksud dari uraian di atas adalah bahwa ideologi ini bisa tidak tampak, tetapi populisme dan sifat nasionalisme partai jauh lebih penting yang diwujudkan dalam program partai. Bukan lagi penonjolan terhadap ideologi antara kiri dan kanan yang terutama, tetapi sejauh mana reaksi partai dalam program konkritnya tanggap terhadap praktek-praktek politik yang kena langsung dengan masyarakat yang terlihat dari program-programnya yang populis dan berciri nasionalis. Sebaliknya program individu jauh lebih penting untuk meraih suara. Reaksi partai yang demikian ini sangat berbeda dengan spektrum kiri dan kanan yang disampaikan di penjelasan awal di atas. Karakter ini bisa menghapus dimensi sayap kiri dan sayap kanan, yang bahkan dalam konteks kajian ini dianalogikan adanya dimensi antar yang berbeda suku atau berbeda agama untuk sebuah keterpilihan.

Dalam konteks ini program partai dan ideologi menjadi dua hal sangat penting ketika menggunakan partai yang menentukan keterpilihan dari kandidat-kandidat yang diusulkan. Memang dalam sistim pemilihan umum tertutup, posisi dan pengenalan terhadap partai politik menjadi sangat penting karena partai menempatkan orang-orangnya.

3. Kedalaman Penetrasi Partai Politik

Teori kedua dari Alan Ware adalah terkait penetrasi dari partai-partai untuk masuk dan dikenal oleh masyarakat luas yang menjadi pemilihnya. Terkait dengan itu, Alan Ware menjelaskan bahwa penetrasi partai politik dalam masyarakat, yakni bagaimana partai memasuki masyarakat itu untuk turut memengaruhi tingkat kompetisi partai politik di masyarakat.

Ada dua jenis penetrasi yang dimiliki oleh partai terhadap masyarakat, yakni penetrasi yang berciri lemah atau kurang kuat dan satu lagi penetrasi yang sangat mendalam masuk ke pengenalan luas dari masyarakat terhadap partai tersebut. Alan Ware menjelaskannya demikian,[3]

> *"In general, party penetration of society affects competition between parties in two ways. The less penetration there is, the easier it will be for new parties to emerge and compete with existing parties. One of the factors which made it easy for new parties to develop in Eastern and Central Europe in the early 1990s was the absence of voter links to existing parties-with the exception of the former Communist Parties. Anyone could start up a new party with some hope of winning converts simply because existing parties were themselves struggling to generate loyalty from their electorates. Of course, there are many institutional factors that restrict the opportunities for potential new entrants in established liberal democracies (such as aspects of the electoral rules), but undoubtedly party*

[3] *Ibid.,* hlm. 150.

penetration of society contributes to limiting these opportunities."

[Secara umum, penetrasi partai atas warga memengaruhi kompetisi di antara partai-partai dalam dua cara. Penetrasi yang lemah tentu saja lebih gampang berlaku bagi partai-partai baru untuk menampakkan diri dan bersaing dengan partai-partai mapan. Salah satu faktor yang membuat partai baru gampang bertumbuh di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada permulaan 1990 an adalah ketidakhadiran jaringan pemilih untuk mendukung partai-partai mapan dengan keberatan dari mantan partai-partai komunis. Setiap orang dapat membentuk partai baru dengan harapan akan bertukar kemenangan dengan gampang karena partai mapan sedang berjuang meregenerasikan loyalitas dari para pemilih mereka. Tentu saja ada banyak faktor institusional yang membatasi kesempatan bagi peserta-peserta baru yang potensial dalam membangun demokrasi liberal (sebagai aspek hukum Pemilu) tetapi dengan memastikan bahwa penetrasi partai atas masyarakat berkontribusi untuk membatasi kesempatan-kesempatan ini.]

Jalan pertama dari partai-partai untuk bersaing adalah jika penetrasi dari sebuah partai kurang (*the less penetration*) memasuki kehidupan masyarakat, maka hal ini dikaitkan bukan lagi hanya terhadap partai tetapi justru terhadap individu. Maka akan lebih mudah bagi partai yang baru untuk memasuki kehidupan masyarakat itu dan berkompetisi dengan partai lama. Untuk mencari

perbandingan terkait konteks pandangan Alan Ware di atas, maka menjadi penting juga mengetahui apakah ada partai-partai baru yang menang di basis pemilihan tersebut dan apakah mereka bisa bersaing dengan partai besar? Dari data dalam penelitian sejumlah studi (termasuk studi disertasi doktoral penulis sendiri) ditemukan fakta bahwa ternyata partai-partai kecil di daerah pemilihan ternyata justru tidak bisa bersaing secara signifikan.

Dalam konteks Pemilihan Umum Legislatif Indonesia di Era Reformasi, setidaknya dalam Pemilu Tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 lalu, terlihat bahwa partai partai tertentu khususnya yang masih baru tidak cukup mampu bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan. Kita sebut misalnya, PDI Perjuangan dan Partai Golkar menjadi dua partai yang sangat menonjol di Subang dan Sumedang dibandingkan partai-partai lain dan seterusnya setidaknya dalam Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014 dan 2019 dibandingkana partai partai lain, apalagi dibandingkan dengan partai partai kecil yang baru lahir. Fakta-fakta sedemikian menunjukkan bahwa penetrasi kedua partai ini sudah begitu mendalam, sehingga bagi partai-partai baru kompetisi partai yang baru berdiri menjadi sangat kecil, sehingga kompetensi bagi partai baru menjadi sangat kecil. Perbandingan ini bisa sekilas dilihat dari perolehan kursi partai-partai di basis pemilihan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Dalam pemilihan umum terbaru misalnya sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) termasuk partai yang perlahan lahan semakin ditinggalkan orang padahal partai ini sudah lahir sejak masa awal lahirnya pemerntahan Orde baru persisnya lahir pada tahun 1973

ketika terjadinya fusi-fusi sepuluh partai politik. Sangat berbeda dengan Partai Demokrat yang baru lahir pada tahun 2003 untuk menjadi peserta pemilu tahun 2004, partai ini malah langsung masuk mengusung calon presiden dan terpilih sebagai Presiden yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu pertama yang diikutinya tahun 2004. Bahkan pada Pemilu Legislatif tahun 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu nasional mengalahkan Partai Golkar dan PDI Perjuangan, dan Kembali Presiden SBY terpilih menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2009. Untuk konteks lain, PDI Perjuangan di Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat selalu menang dalam 25 tahun terakhir walaupun politik identitas atas nama Agama Islam sangat kuat dengan basis utamanya di Jawa Barat termasuk dalam pemilu 2014 dan 2019 lalu. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan perolehan suara partai-partai lain seperti PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan sejumlah partai lain.

Jalan kedua terkait penetrasi partai menyangkut persaingan partai di tengah masyarakat yakni bahwa semakin besar penetrasi partai terhadap masyarakat maka partai itu semakin kuat untuk ingin berkonsentrasi dalam merebut dukungan suara dari pemilih setianya. Alan Ware menjelaskannya demikian,[4]

> *"The greater the social penetration of parties, of more they are tempted to concentrated on retaining the support of their loyalists. And the more parties there are in a 'highly penetrated'*

[4] *Ibid.*

system, the more all will tend to focus on retaining the support of loyalists. In these circumstances, they have little incentive to act as "catch-all" parties seeking votes from a wide range of groups in society. The consociational system in the Netherlands (1917-late1960s) was an example of extensive party penetration by all the major parties. It was a highly stable party system, arguably not in spite of but because of the highly partisan appeals made by parties to voters."

["Penetrasi sosial yang lebih besar dari partai yang lebih banyak mereka usahakan adalah mencoba berkonsentrasi mempertahankan dukungan para loyalis mereka. Dan lebih banyak partai berada dalam sebuah sistim 'penetrasi tinggi', selebihnya semua bermaksud berfokus pada sisa-sisa dukungan para loyalist mereka. Dalam lingkaran ini, mereka memiliki sedikit insentif untuk bertindak sebagai partai yang terbuka untuk semua *(catch-all*) yang mencari pemilih dari rentang yang luas kelompok masyarakat. Dalam sistim konsosiacional di Belanda (1917 hingga akhir 1960an) merupakan contoh dari penetrasi partai yang luas oleh semua partai besar. Itu semua adalah sistim partai yang sangat stabil, tidak ada perdebatan apapun kecuali jika karena permohonan tertinggi dari pengikut setia yang dibuat oleh partai-partai terhadap pemilih."]

Uraian di atas menunjukkan bahwa jalan persaingan kedua adalah adanya upaya dari partai-

partai untuk melakukan penetrasi yang besar ke tengah masyarakat untuk meraih dukungan pemilih, entah berdasarkan agama, suku, atau program partai yang lain. Mereka menciptakan pemilih-pemilihnya yang sudah sangat loyalist terhadap partai bersangkutan. Penetrasi partai yang sudah sedemikian besar memungkinkan partai tersebut bahkan memenangkan seluruh kursi dari sebuah daerah yang berkemungkinan merupakan pemilih loyalist terhadap sebuah partai tertentu.

Penciptaan dari penetrasi yang besar terhadap pemilih membuat partai memiliki pemilih loyalist di sejumlah daerah. Situasi bahwa partai memiliki pemilih loyalist tersebut memungkinkan partai mendapatkan seluruh (*catch-all)* kursi dalam sebuah daerah. Dan sebaliknya, persaingan yang besar dari partai-partai terhadap para pemilih loyalistnya membuat partai-partai tidak bisa mendapatkan pemilih yang lain untuk menjadi pemilihnya sebagaimana partai itu maksudkan karena sejumlah pemilih yang lain juga merupakan pemilih loyalistnya. Masing-masing caleg diciptakan untuk bersaing yakni menyangkut kemampuan *capital*/modal, jaringan/*networking*, kemampuan kampanye (*campaign*), dan berbagai hal lain untuk memenangkan suara. Posisi partai politik menjadi nomor dua untuk upaya pemenangan tersebut. Jadi ini bisa dihubungkan, bahwa sistim penetrasi ini sudah dilakukan oleh partai masing-masing. Memang partai-partai sudah melakukan upaya penetrasi ini baik yang berciri lemah maupun yang berciri kuat.

Bahkan demi sebuah penetrasi, partai politik pun tidak sungkan untuk mengubah diri dari yang

sebelumnya sangat eksluisf menjadi partai yang inklusif. Ciri inklusifitas yang merangkul semua pihak menjadi pembeda serius partai politik dari yang sebelumnya menjadi corong yang sangat ekslusif. Salah satu contoh partai yang sangat terlihat dalam Pemilu Era Reformasi Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keputusan Musyawarah Nasional II PKS 2008 sebagai partai terbuka menjadi memesona. Selama ini orang menganggap PKS sebagai partai yang militan, eksklusif, dan berpaham Islam konservatif, tetapi dengan tegas PKS menyataka drinya sebagai partai yang meragkul semua pihak sebagi partai yang inklusif.

Hasilnya, PKS satu-satunya partai primordial atas nama agama yang meraih hasil bagus sejak Pemilu 2009 selalu di kisaran perolehan suara sekitar 7,8%, bahkan dalam Pemilu 2019, PKS meraih suara tertingginya di angka 8,1%, angka yang belum penah diraih di pemilu-pemilu sebelumnya. Ini bukti penetrasi yang digagas oleh PKS benar-benar bisa diterima oleh pemilihnya.

Lalu bagaimana dengan seleksi kandidat dipahami oleh Alan Ware?

4. Seleksi Kandidat Partai

Terkait dengan seleksi kandidat dan kepemimpinan, menurut Alan Ware kepemimpinan di internal partai tidak terlepaskan dalam proses menentukan salah satu seleksi untuk pencalonan. Namun seleksi tersebut, walaupun mengedepankan kepemimpinan seorang calon di tingkat kepengurusan partai, tetap harus mempertimbangkan sejauh mana calon dimaksud mendapat tingkat penerimaan ketika

dijual di tengah pemilih untuk dipilih oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Alan Ware menjelaskannya demikian,[5]

> *"Those who aspired to the highest reaches of party leadership would now have careers that embraced both high profile elected public office and, often but not invariably, positions within the party organization. With no experience in elective public office, the would-be leader could not convince those responsible for selection that he or she had the credentials to appeal to mass electorates."*
>
> ["Orang-orang yang teraspirasi untuk pencapaian tertinggi kepemimpinan partai sekarang ini memiliki karier yang dicakup baik profil tinggi yang dipilih dari pegawai public maupun selalu terkait posisi dengan organisasi partai tetapi tanpa bervariasi. Dengan tanpa pengalaman di kantor-kantor public terpilih, pemimpin masa depan tidak dapat meyakinkan orang-orang yang dapat dipersalahkan untuk pemilihan sehingga setiap orang memiliki kepercayaan untuk menarik perhatian massa pemilih."]

Terkait dengan seleksi terhadap kandidat dan kepemimpinan di atas, Alan Ware memberikan argumentasi bagaimana seleksi yang dilakukan untuk keterpilihan yakni untuk dipilih masyarakat terkait alasan mengapa partai memilih orang-orang tertentu

[5] *Ibid.,* hlm. 258.

untuk duduk pada kursi-kursi pemilihan itu. Ketika bicara partai politik terkait kandidat untuk duduk di kursi legislatif, menurut Alan Ware, partai politik akan menempatkan orang-orangnya yang mempunyai tingkat tertingggi dalam kepemimpinan. Dan juga mempunyai tingkat tertinggi dalam hal elektabilitas dalam pemilihan. Ini juga terkait dengan posisinya dalam partai politik, jika tidak ada pengalaman dalam kepemilihan politik (*public office*), maka posisi *leader* ini tidak cukup diyakinkan pada proses pemilihan. Jadi partai juga pada intinya menjadi rasional kalau seseorang tidak punya latar belakang (*back ground*) kepemimpinan atau kemungkinan besar untuk terpilih, partai juga tidak akan menempatkan dia pada posisi nomor urut yang sangat besar seperti nomor urut 1, 2, atau 3. Karena sebuah partai sama halnya bersikap bunuh diri bila dalam penentuan calon menempatkan sosok yang tidak layak jual di tengah masyarakat pemilih.

Terkait penentuan kandidat yang akan diusung, maka partai melakukan seleksi yang tersentral yakni mengikuti hukum umum sebagaimana diatur oleh partai secara detail. Selain itu ada juga seleksi yang tidak tersentral yang merupakan kebijakan dari partai yang tidak tersurat secara jelas. Kemungkinan ada peluang bagi calon-calon yang diunggulkan atau calon-calon yang maju tidak mengikuti hukum yang umum tetapi merupakan pertimbangan saja dari pengambil kebijakan untuk penentuan calon tersebut. Terkait dengan hal ini, Alan Ware menjelaskannya demikian,[6]

[6] *Ibid.,* hlm. 263.

"However, even in parties where the direct role of the center in selecting candidates is insignificant, the centre may establish rules and procedures that, indirectly, are extremely important in deciding what kinds of candidate will be selected. […] That there is a party policy on quotas for women or for other social groups – is important in setting the agenda for local parties when it undertakes candidate selection even when the centre cannot overturn the decisions of these parties."

["Namun bahkan ketika partai-partai dimana peranan langsung dari pusat dalam menyeleksi kandidat menjadi tidak signifikan, maka pusat mungkin membangun hukum dan prosedur, yang secara tidak langsung, sangat penting dalam memutuskan jenis kandidat apa yang akan diseleksi. […] sehingga ada kebijakan partai tentang kuota perempuan atau bagi kelompok sosial yang lain – menjadi penting dalam mengatur agenda bagi partai-partai local ketika hal itu membenarkan seleksi kandidat bahkan ketika pusat tidak dapat mengubah keputusan atas partai-partai ini."]

Alan Ware menyebutkan bahwa meskipun dalam partai sendiri ada peran langsung dan terpusat dalam menyeleksi kandidat yang penting, pihak pengurus pusat *(centre)* bisa juga menetapkan peraturan atau prosedur secara tidak langsung tetapi sangat penting dalam memutuskan kandidat seperti apa yang harus dipilih. Alasannya tentu saja karena

bagaimanapun partai akan sangat berkepentingan menempatkan orang yang satu etnik dengan pemilih, yang satu agama dengan pemilih. Namun mungkin ada peraturan di internal partai bahwa hal itu tidak menjadi pilihan baku sepanjang seseorang itu bisa diterima, bisa mewakili partai, dan tingkat penerimaan pemilih terhadap yang bersangkutan bisa menjadi cukup besar. Maka menjadi penting bahwa partai memiliki peraturan sendiri yang menempatkan seseorang secara langsung walaupun tidak sesuai dengan hukum umum yang berlaku di partai tersebut.

Mestinya partai menempatkan orang yang diharapkan memperoleh suara besar karena ternyata orang bersangkutan memang bisa diterima. Mungkin ada peraturan yang tidak langsung karena melihat individunya, tidak mengikuti paham yang umum itu. Terkait dengan rekrutmen politik oleh partai sebagaimana diungkapkan oleh Alan Ware menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik.[7] Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.

5. Penutup

Jika kita merujuk dalam konteks keterpilihan caleg-caleg Kristen, misalnya ketika dilihat bagaimana mereka terpilih dari daerah berbasis Islam seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain, tentu akan memunculkan pertanyaan apakah faktor sesungguhnya yang paling menentukan: apakah figure yang

[7] *Ibid.,* hal 5-10. Lihat juga Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan praktek di Indonesia,* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 89-90.

bersangkutan atau justru karena faktor partai politik pengusung para caleg tersebut? Akan terlihat jelas apakah faktor sosok atau figur dari caleg yang bersangkutan yang paling dominan atas keterpilihannya, atau justru faktor partai yakni pelaksanaan program partai yang dilakukan terus menerus kepada warga atas nama partai yang bersangkutan, atau justru pemilih tersebut adalah pemilih tradisonal yang lebih melihat ideologi partai. Ideologi dimaksud yakni warga menentukan pilihannya karena melihat partainya, yakni karena PDI Perjuangan atau karena Partai Golkar, warga tidak perduli apakah caleg yang diusung kedua partai dimaksud dikenal warga atau tidak, sudah berbuat banyak kepada warga atau tidak.

Ketiga level pengaruh tersebut sebagaimana dimaksudkan Alan Ware ternyata menunjukkan hasil dalam sebuah penelitian yang sudah teruji dalam sebuah disertasi oleh penulis sendiri bahwa ketiga factor yakni: ideologi partai politik, program partai politik, dan kehadiran sosok atau figure yang teruji dan terpuji menjadi menentukan. Dari ketiga faktor tersebut, yang pernah diteliti oleh penulis, faktor yang memiliki pengaruh paling dominan adalah faktor kehadiran sosok atau figure yang teruji dan terpuji. Faktor ini sangat terlihat jelas ketika faktor sosok atau figure merekalah yang paling dominan yang menentukan keterpilihan caleg-caleg Kristen tersebut bila dikaitkan dengan teori Alan Ware di atas.

Alasannya sangat jelas, yakni karena calon legislatif yang bersangkutan sering-sering hadir ke tengah public secara langsung di saat masyarakat sangat membutuhkan kehadiran mereka khususnya untuk urusan urusan kepentingan publik. Atau juga karena sosok mereka menjadi figure publik yang sering muncul di media massa

dan elecktronik dan tidak memliki catatan dan latar belakang yang buruk di mata pemilih.*****

BAB 3
POLITIK KEHADIRAN SEBAGAI BENTUK PERWAKILAN POLITIK

1. Pengantar

Bila merujuk bagaimana sistim perwakilan politik melalui keterpilihan calon legislatif yang mengutamakan kehadiran sosok atau figur dari kandidat sebagaimana disampaikan Alan Ware dalam Bab 2, maka menjadi sangat penting untuk merefleksikan ulang pandangan Anne Philips tentang sisi lain dari sistim keterwakilan politik. Anne Philips berfokus pada bagaimana setiap wakil dimaksud bisa hadir secara politik realitas, bukan karena diwakilkan atau digantikan oleh pihak yang lain. Maka Anne Philips sangat mengutamakan bahwa sistim perwakilan politik harus bersandar pada prinsip *politics of presence* (politik kehadiran*).*

2. *Politics of Presence* sebagai Pengakuan Kesetaraan

Menurut Philips, fondasi dasar bagi *politics of presence* (politik kehadiran) disandarkan pada dua hal, yakni: *pertama,* pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat, dan *kedua*, adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik. Dua prinsip ini menjadi dasar penting bagi politik keterwakilan sehingga menuntut perlunya hadir keterwakilan secara langsung di kalangan

minoritas dalam lembaga-lembaga negara. Philips mengatakan,[8]

> *"On the face of it, at least, these two principles of popular control and political equality provide a good basis for the politics of presence. Control is just a pious aspiration unless people are actually there; equality is hardly achieved when some groups have so much more leverage than others. [...] These two principles certainly set the framework for any politics of presence, […]."*
>
> ["Sekurang-kurangnya ada dua prinsip terpenting yakni kontrol publik dan kesetaraan politik sebagai dasar bagi politik kehadiran. Kontrol dibutuhkan ketika aspirasi warga tidak diaktualisasikan, sementara kesetaraan sungguh dibutuhkan ketika ada sejumlah kelompok yang lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Dua prinsip ini merupakan bingkai bagi setiap politik kehadiran."]

Bagi Philips, satu-satunya yang bisa memastikan sistim keterwakilan politik setiap pihak atau kelompok entah berdasarkan apapun seperti ras, jenis kelamin, organisasi buruh, persatuan para nelayan, kelompok agama, perhimpunan suku, dan kelompok kepentingan lain-lain, semua harus bersandar pada prinsip *politics of presence.* Keterwakilan itu tidak bisa dititipkan kepada pihak lain yang tidak setara dan tidak sejenis dengan pihak atau kelompok yang diwakilkan. Alasannya, kepentingan mendasar dari pihak yang akan diwakili hanya dipahami dan diketahui persis oleh anggota atau persekutuan

[8]Anne Philips, *The Politics of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hal 30-31.

kelompok tersebut. Maka tidak relevan untuk menitipkan kepentingan satu pihak atau sekelompok rumpun tertentu kepada pihak lain yang tidak serumpun atau sejenis. Sebab jika hanya diwakili oleh pihak lain yang tidak serumpun atau tidak sejenis maka harapan dan cita-cita yang digagas oleh wakil tersebut bisa sangat berbeda originilitasnya dengan maksud yang sesungguhnya diharapkan dan dicita-citakan oleh pihak yang diwakilinya.

3. Kontrol Publik dan Persamaan Politik

Maka sekurang-kurangnya ada dua prinsip dalam politik kehadiran yakni kontrol masyarakat, dan persamaan politik untuk menyediakan fondasi yang baik bagi politik kehadiran *(politics of presence)*. Bagi Philips,[9]

> *"On the face of it, at least, these two principles of popular control and political equality provide a good basis for the politics of presence. Control is just a pious aspiration unless people are actually there; equality is hardly achieved when some groups have so much more leverage than others."*
>
> ["Terhadap hal itu, sekurang-kurangnya dua prinsip tentang kontrol publik dan kesetaraan politik menyediakan sebuah basis yang baik bagi politik kehadiran. kontrol hanya aspirasi pokok jika orang-orang yang mewakili tidak ada di sana secara actual; kesetaraan hanya sungguh dibutuhkan bila ada beberapa kelompok memiliki pengaruh luar biasa dibandingkan kelompok-kelompok lain."]

[9] *Ibd.,* hlm. 30.

Kontrol menjadi sangat penting ketika para wakil tidak mampu membawa aspirasi yang diwakili secara actual; sementara kesetaraan hanya akan sungguh dibutuhkan bila terdapat adanya beberapa kelompok yang berpengaruh luar biasa dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ini memaknai bahwa semua warga negara harus memiliki kewenangan yang setara atas hasil yang diperoleh. Kata Anne Philips,[10]

> *"Political equality does not specify just one kind of treatment. It can be taken to mean that all citizens should have equal power over outcomes, that all political preferences should be given equal weight, or (somewhat less plausibly) that all citizens should have an equal chance of voting for a winning candidate."*
>
> ["Kesetaraan itu tidak spesifik hanya merupakan suatu jenis penanganan. Itu dapat dimaksudkan bahwa semua warga Negara harus memiliki kesetaraan kekuasaan atas hasil (*outcomes*) sehingga semua preferensi politik harus dianggap memiliki beban yang setara sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama menentukan pilihan untuk kandidat yang menang."]

Keterwakilan politik yang dimaksudkan Anne Philips menggunakan kategori minoritas perempuan dalam politik, tetapi teori ini setidaknya membantu melihat seluruh keterwakilan kelompok minoritas secara umum. Salah satu kelompok minoritas politik dalam konteks Indonesia misalnya bisa kita sebut adalah keterwakilan

[10] *Ibid.,* hal 36.

politik dalam bidang agama Kristen dalam keterpilihannya sebagai anggota DPR RI.

Menurut Philips, hanya kelompok itu sendiri yang tahu persis apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana sejarah dan asal muasal proses terjadinya dari gagasan perubahan dan kehendak mendasar bagi diri mereka masing-masing. Persis seperti kepentingan kelompok pembela kesetaraan hak-hak perempuan misalnya, sesungguhnya hanya bisa dirasakan secara jujur oleh kalangan perempuan itu sendiri walaupun sejumlah laki-laki sangat paham apa yang dimaksud oleh kesetaraan gender/jenis kelamin. Maka yang mestinya mewakili kesetaraan dan perjuangan gender itu seharusnya oleh kalangan perempuan, bukan diwakilan ke kalangan pria yang walaupun sangat paham dengan maksud dan gagasan perjuangan gender.

Sayangnya, kata Philips, persoalan terbesar di kalangan pemilih adalah kesulitan besar bagi para pemilih untuk persis mengenali calon-calon atau kandidat yang akan dipilih, entah karena berbagai alasan. Sangat mungkin pemilih tidak memiliki informasi yang cukup luas tentang para kandidat, sangat mungkin para pemilih tidak begitu perduli dengan para kandidat karena selama ini para wakil terpilih tidak jujur menjadi wakil dari para pemilih. Atau sebaliknya dari pihak kalangan kandidat sangat mungkin tidak memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak patut diberi apresiasi, atau kandidat tidak memiliki kesempatan yang cukup memadai untuk membuktikan rekam jejak dirinya yang mampu menarik simpati dan apresiasi dari pemilih. Sangat mungkin para kandidat tidak memiliki upaya serius menghadirkan dirinya ke para pemilih yang lebih luas, sehingga ruang pengenalan terhadap diri para

kandidat hanya di daerah-daerah atau lingkup kecil tertentu.

Akibatnya kata Philips, kebanyakan pemilih hanya memiliki pemahaman sangat terbatas atau bahkan tidak perduli menyangkut kemampuan atau talenta-talenta para kandidat yang mestinya menjadi dasar bagi penentuan pilihan politik pemilih. Philips mengatakan,[11]

> *"Most voters know too little about the candidates to make their talents or virtues the basis for political choice. Most voters, indeed, would query whether these should be a central concern. We might all wish to be represented by people we regard as wiser or more able than ourselves, but, faced with a choice between someone or more competent and someone whose views we can share, we usually feel safer in giving our support to the latter. The political party provides us with the necessary shorthand for making our political choice: we look at the label rather than the person, and hope we will not be let down."*
>
> ["Kebanyakan pemilih memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang kandidat baik tentang talenta mereka maupun tentang kebijakan-kebijakan mereka untuk menjadi dasar bagi pilihan politik bagi pemilih. Karena itu kebanyakan pemilih akan mempertanyakan bahwa hal ini seharusnya menjadi sebuah perhatian utama. Kita semua mungkin mengharapkan untuk diwakili oleh orang yang kita anggap lebih bijaksana atau memiliki kemampuan yang lebih daripada diri kita sendiri tetapi berhadapan dengan pilihan di antara sejumlah atau

[11] *Ibid.,* hlm. 1.

yang lebih berkompeten dengan sejumlah orang yang memiliki pandangan yang dapat kita bagikan, kita biasanya merasa lebih tenang dalam memberikan dukungan kita kepada yang terakhir. Partai politik menyediakan kepada kita kepentingan-kepentingan jangka pendek bagi pilihan-pilihan politik kita: kita cenderung lebih memperhatikan label daripada sosok, dan berharap kita tidak dikecewakan."]

Anne Philips berpatokan pada pencerminan atau keterwakilan deskriptif di mana penting mempertanyakan apa yang perwakilan sudah lakukan untuk pemilihnya lebih dari sekedar mengetahui siapa yang terpilih menjadi anggota legislative.[12] Tindakan realita yang sudah dilakukan secara riil ke tengah publik jauh lebih penting dari sekedar memperoleh hasil dari nama-nama yang terpilih. Realitas Tindakan *(reality of actions)* menjadi sangat penting bagi masyarakat pemilih sebab yang dibutuhkan oleh rakyat adalah tindakan-tindakan konkrit dari legislative terpilih, bukan janji-janji atau sekedar pajangan nama-nama yang menghiasi papan pengumuman pemenang para kandidat yang terpilih.

4. Politik Gagasan Para Kandidat

Salah satu yang paling diharapkan dari setiap kandidat adalah lahirnya politik gagasan dari apa yang lahir dan bertumbuh di benak setiap kandidat. Maka menjadi sangat penting politik gagasan (*politics of ideas)* dari setiap

[12] Pandangan ini pada awalnya disampaikan oleh Hanna Pitkins, yang kemudian diikuti oleh Anne Philips untuk menegaskan argumentasinya tentang pencerminan keterwakilan. Lihat, H. Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley, 1967) dalam *Ibid.,* hlm. 4.

kandidat atau anggota legislative terpilih dimana sangat sering terdapat sekelompok masyarakat mengalami ketidak-setaraan terhadap sekelompok pengambil kebijakan dan yang terjadi adanya perilaku entah kentara atau tersembunyi menjadi alasan bagi pengucilan sekelompok masyarakat secara politik.[13] Kelompok-kelompok yang tidak setara entah karena alasan kepemilikan yang sedikit atau kalangan miskin, alasan pengetahuan yang sederhana terhadap kalangan terdidik, atau ketertutupan akses kepada kekuasaan membuat sekelompok masyarakat menjadi terkucil.

Anne Philips menegaskan bahwa perbedaan mestinya diterima dalam kaitan berbagai pengalaman dan identitas orang-orang yang dapat mendasari *(constitute)* berbagai jenis kelompok yang berbeda. Perbedaan antar kelompok kepentingan seperti: kelompok suku, kelompok agama, golongan pekerjaan entah organisasi buruh atau paguyuban para nelayan yang merasa kepentingan dan kebutuhan mendasar mereka terabaikan oleh negara mestinya tidak terjadi. Perjuangan untuk memenuhi harapan setiap kelompok tersebut maka mestinya setiap kelompok memiliki perwakilan langsung dalam lembaga-lembaga negara pengambil kebijakan secara riil, entah di legislative, di eksekutif atau di lembaga-lembaga negara lain yang kepentingan mereka bisa diakomodir. Kepentngan setiap kelompok itu tidak tepat jika sekedar diwakilkan kepada pihak lain, bahkan termasuk pihak partai apalagi jika partai itu sangat mungkin tidak pernah mengurusi bidang-bidang spesifik dari setiap kelompok kepentingan tersebut. Sehingga sangat mungkin partai-partai politik yang tidak memiliki konsentrasi dan kepentingan terhadap

[13] *Ibid.,* hlm. 6.

apa yang dipikirkan oleh salah satu kelompok kepentingan malah mungkin tidak mengerti atau bahkan lebih memprihatinkan lagi memberi gagasan berbeda dari apa yang dibutuhkan oleh kelompok kepentingan yakni para petani, buruh, nelayan, ras, agama dan kelompok kepentingan lain.

Di era kontemporer, kehadiran politik sering muncul dari gerakan sosial baru *(new social movement)* sebagai refleksi ketidaksetaraan kelas sosial antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, yakni sepanjang kelas sosial terdapat ketidaksetaraan (*the pre-eminent group of inequality*). Gerakan sosial baru muncul dari perjuangan atas ketidaksetaraan yang dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan perilaku negara terhadap sejumlah masyarakat tertentu. Kerap negara tidak menyadari ketimpangan perilaku dan kebijakannya, yang dirasakan sekelompok masyarakat yang terabaikan dibanding sekelompok masyarakat lain yang diberi kemudahan dan pelayanan lebih baik entah disadari atau tidak memunculkan rasa ketidakadilan public. Ketidakadilan itu memunculkan upaya untuk memperjuangkan niat-niat dan kebutuhan mendasar mereka atas ketidakadilan yang jika masih terus menerus diabaikan maka pada ujungnya melahirkan gerakan sosial baru di tengah masyarakat.

Perjuangan atas ketidaksetaraan melahirkan kalangan liberalis yang menegaskan tidak adanya perbedaan dan posisi sosialis yang menekankan pada pengeliminasian. Menurut Philips,[14]

> *"Contemporary demands for political presence have often arisen out of the politics of new social*

[14] *Ibid.,* hlm. 8.

movements, and they all reflect inequalities other than social class. This is an important point of distinction, for as long as social class was regarded as the pre-eminent group inequality, arguments could divide relatively neatly between the liberal position, which sought to discount difference (we should be equal regardless of difference), and the socialist position, which aimed at elimination (we cannot be equal until the class difference has gone)."

["Permintaan kontemporer bagi kehadiran politik sering muncul dari gerakan sosial baru, dan mereka merefleksikan ketidak-setaraan kelas sosial antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Inilah poin penting tentang perbedaan sepanjang kelas sosial dianggap sebagai ketidak-setaraan kelompok yang paling unggul, argument dapat terbagi secara relative rapi di antara posisi liberal yang tampaknya memotong perbedaan (kita seharusnya setara tanpa ada perbedaan), dan posisi kalangan sosialis yang bertujuan mengeliminasi (kita tidak mungkin setara selama perbedaan kelas masih ada)."]

Refleksi atas ketidaksetaraan itu melahirkan gagasan entah perlunya campur tangan pemerintah yang semakin luas dan langsung mengenai kebutuhan konkrit dan riil masyarakat, tentu saja dengan batasan-batasan yang wajar sebagaimana dipikirkan oleh kalangan sosialis. Secara sederhana kalangan sosialis bisa dikatakan mengharapkan adanya pengaruh negara bahkan campur tangan negara lebih jauh termasuk dalam persoalan-persoalan teknis untuk kepentingan lebih luas masyarakat. Negara perlu campur tangan,

misalnya: penentuan harga-harga bahan pangan pokok, menentukan harga-harga minyak bumi yang lebih setara antara daerah pegunungan dengan daerah perkotaan, penentuan harga-harga pupuk di daerah pertanian di wilayah perkotaan supaya tidak terlalu jauh perbedaan harganya dengan pertanian di desa-desa terpencil dan pegunungan yang akses lokasinya sangat sulit dan sulit terjangkau. Bagi aliran sosialis (sosialisme), campur tangan negara sangat dibutuhkan untuk urusan-urusan riil sehari-hari masyarakat luas tentu dalam batasan-batasan dan kualitasnya yang berbeda.

Refleksi lain dari ketidaksetaraan juga memunculkan lahirnya keinginan untuk menggagas pemberian kebebasan dan penentuan diri secara bebas yang lebih jauh kepada setiap individu dari urusan campur tangan negara. Secara sederhana dan dalam batas-batas yang wajar, kalangan liberalis dengan model-model pembaharuannya secara umum melihat bahwa kebebasan menjadi prinsip dari hak-hak asasi manusia untuk setiap orang. Prinsip kebebasan (liberal) itu menjadi dasar bagi setiap orang menentukan raihan cita-cita dan penentuan dirinya mendapatkan seluas-luasnya apapun gagasan dan mimpi yang tertanam mendalam di sanubarinya. Aspek kebebasan menjadi prinsip dasar kalangan liberalis yang dalam liberalis ekstrim mengagungkan kebebasan setiap orang.

Gagasan aliran liberalisme muncul dari ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Eropah dan Amerika di abad-abad ke-19 dan abad ke-20. Kalangan liberalis menuntut sebuah pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk

menentukan dirinya sesuai dengan talenta dan kemampuannya yang diberikan Tuhan kepada diri setiap orang. Kebebasan menjadi kunci mendasar walaupun kalangan neo-liberalisme menuntut perlunya campur tangan negara dalam porsi yang wajar sehingga tidak mutlak membiarkan kebebasan berlebihan setiap orang menentukan dirinya. Bagi kalangan liberalis, pembatasan-pembatasan membuat setiap orang tidak bisa memaksimalkan pencapaian dan perjuangan diri mereka masing-masing untuk menemukan makna hidup dan kualitas diri sesuai talenta yang mereka dapatkan dari Tuhan Sang Pencipta.

Menempatkan diri secara berlebihan dalam campur tangan pemerintah sebagaimana dipikirkan oleh kalangan sosialis, dan kebebasan yang sebebas-bebasnya sebagaimana dipikirkan oleh kalangan liberalis, justru juga akan menciptakan ketidakadilan baru. Dua gagasan itu harus terus menerus dikoreksi dan mendapat keseimbangannya antara kebebasan yang wajar dan sepatutnya dengan norma-norma yang terukur di satu pihak. Sementara di lain pihak perlu campur tangan pemerintah untuk kebutuhan publik yang lebih luas dalam batas-batasnya yang wajar tanpa menghilangkan kebebasan dan pengakuan terhadap marabat individu.

5. *Politics of Presence* dalam Pemerintahan Mayoritas

Terhadap kemungkinan ketidakadilan sistim perwakilan di atas, maka jalan terbaik untuk sistim perwakilan menurut Philips dengan mengutip literatur ilmu politik Arendt Lijphart, adalah pentingnya menempatkan ide-ide dan gagasan terkait penekanan kehadiran politik *(political presence)*. Teori Lijphart

tentang keterwakilan politik tanpa perbedaan kelas sangat berpengaruh dengan teori demokrasi persekutuan atau consensus *(theory of consociational or consensual democracy)* yang berfokus pada pembagian masyarakat menyangkut agama atau budaya, atau kedua-duanya sekaligus.

Lijphart berargumen: *"majority rule is not only undemocratic but also dangerous, because minorities that are continually denied access to power will feel excluded and discriminated against and will lose their allegiance to the regime".*[15] Pemerintahan mayoritas tidak hanya bermakna tidak demokratis, tetapi juga berbahaya, karena minoritas yang terus ditolak mendapatkan akses terhadap kekuasaan akan selalu merasa tersingkirkan dan menjadi lawan yang terdiskriminasikan dan mereka kehilangan peluang terhadap kekuasaan.

Philips mengutip definisi demokrasi yang disumbangkan *Democratic Audit of the UK* yang mengidentifikasi kontrol public dan kesetaraan politik sebagai dua kunci prinsipil demokrasi. Philips katakan,[16]

> *"A more useful definition is that supplied by the Democratic Audit of the UK, which identifies popular control and political equality as the two key principles of democracy, and takes these as the benchmark against which to evaluate contemporary democracy. No sistem can claim to be democratic if it does not recognize the legitimacy of these two goals; and democracies*

[15] Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consnesus Government in Twenty-one Countries* (New Haven, 1984), hlm. 22-23.

[16] *Ibid.,* hlm. 27.

can be located along a continuum depending on how well these principles are realized in their practice."

["Definisi yang lebih bermanfaat ditawarkan oleh Democratic Audit dari Inggris, yang mengidentifikasi kontrol public dan kesetaraan politik sebagai dua kunci prinsip demokrasi, dan mengambil keduanya sebagai patokan perlawanan untuk mengevaluasi demokrasi kontemporer. Tidak ada sistem yang dapat mengklaim untuk menjadi demokratik jika tidak mengenal legitimasi dari dua tujuan ini; dan demokrasi dapat ditempatkan sepanjang ketergantungan terus menerus tentang bagaimana prinsip ini direalisasikan dalam prakteknya."]

Dalam kerangka kerja demokrasi langsung, kontrol adalah sebuah fungsi kehadiran; karena kapasitas untuk memengaruhi keputusan politik secara sederhana tergantung pada kehadiran dalam pertemuan-pertemuan yang relevan, dan orang-orang yang tidak hadir dalam pertemuan kehilangan kesempatan mereka memberikan kontrol.

Bersandar pada pertanyaan Charles Beitz apakah kesetaraan individual berdampak pada perluasan kesetaraan di antara kelompok sosial termasuk kemungkinan pemilih memiliki pengaruh yang sejajar dalam komposisi pemerintahan yang

dipilih,[17] Philips berargumen bahwa alasan bagi kehadiran politik tidak dapat dipandang sekedar pengambilan kesimpulan transparan (*transparent deduction)* baik dari kontrol public maupun kesetaraan politik. Kesetaraan kehadiran *(equality of presence)* sudah implisit dalam partisipasi politik, namun hal itu tidak serta merta implisit dalam keterwakilan politik. Philips mengatakan,[18]

> *"The first issue is best approached by considering the differences between political participation and political representation, for, while equality of presence is already implicit in the former, it is not so obviously implicit in the latter. The literature on democracy and participations takes as its starting point the notion that political equality involves some degree of equality in participation, and it treats the sistematic absence of particular social groups as a self evident failing of democracy."*
>
> ["Isu pertama sangat baik didekati dengan menganggap perbedaan antara partisipasi politik dengan keterwakilan politik, karena, sementara kesetaraan kehadiran sudah implisit dalam yang terdahulu (partisipasi politik), namun hal itu tidak serta merta implisit dalam yang terakhir (keterwakilan politik). Literature demokrasi dan partisipasi mengambil hal itu sebagai titik berangkat ide-ide sehingga

[17] C.R. Beitz, *Political Equality: An Essay in Democratic Theory* (Princeton, 1989), hlm. 127-128. Pandangan ini juga ditemukan dalam Anne Philips, *The Politics Of Presence* (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 30-31.

[18] *Ibid.*

kesetaraan politik meliputi derajat kesetaraan dalam partisipasi, dan hal itu mendorong ketidakhadiran yang sistemik kelompok sosial yang khusus sebagai sebuah kegagalan dari demokrasi dalam dirinya sendiri secara terang benderang."]

Literature demokrasi dan partisipasi mengambil hal itu sebagai titik berangkat ide-ide sehingga kesetaraan politik meliputi derajat kesetaraan dalam partisipasi, dan hal itu mendorong ketidakhadiran yang sistemik kelompok sosial yang khusus sebagai sebuah kegagalan dalam dirinya sendiri secara terang benderang dari demokrasi.

6. Penutup

Seluruh pikiran akan pentingnya *politicsof presents* (politik kehadiran) hadir langsung di tengah kekuatan mayoritas untuk mewujdukan kesetaraan lewat kontrol public sebagaimana digagas oleh Anne Philips di atas. Gagasan *politicsof presence* akan mendapat catatan kritis lain Ketika sistim perwakilan politik mengandalkan isu-isu primordial. Clifford Geertz, seorang Indonesianis yang meneliti politik keterwakilan di Indonesia justru melihat Indonesia dari sudut pandang kuatnya politik primordialisme yang kemudian diperhadapkan dengan tantangan akan nasionalisme.

Bab berikutnya akan membahas pemikiran dan gagasan Clifford Geertz terkait sistim keterwaklan politik di Indonesia yang mengusung politik priordialisme dan tuntutan akan nasionalisme.*****

BAB 4
IKATAN PRIMORDIAL DALAM PERWAKILAN POLITIK

1. Pengantar

Sudut lain yang menarik ditelisik terkait sistem perwakilan politik adalah lahirnya ikatan primordial dalam politik, selain keterpilihan kandidat menjadi wakil politik warga ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa terang benderang bagi publik kehadiran sosok atau figure politik untuk dipilih tanpa ragu oleh pemilih sebagaimana disampaikan oleh Alan Ware. Ikatan primordial ini berbeda dari maksud *politics of presence* (politik kehadiran) sebagaimana dimaksudkan oleh Anne Philips walaupun politik kehadiran merupakan perwakilan politik dari sekelompok masyarakat yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian oleh negara, dan bahkan mungkin ditinggalkan oleh para wakil terpilih.

Ikatan primordial menjadi unsur pembeda dalam politik yang membuat hiruk pikuk politik menjadi sangat ramai bahkan cenderung bertensi panas seperti dialami oleh Indonesia setidaknya dalam tiga kali pemilu terakhir di Era Reformasi. Setidaknya dalam tiga kali masa pemilu terakhir yakni Pemilu Presiden tahun 2014, Pemilu Kada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dan Pemilu Presiden tahun 2019 adalah tiga contoh pemilihan umum yang memiliki tensi sangat tinggi dan panas oleh kehadiran politik identitas.

Namun politik identitas yang sama justru tidak mengakar kuat dalam pemilihan legislative setidaknya jika kita melihat bagaimana kandidat-kanditat partai politik beragama Nasrani justru memenangkan suara besar di daerah-daerah pemilihan berbasis Islam beberapa bisa disebut diantaranya adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, Sulawesi Selatan, dan sejumlah daerah lain sepanjang Pemilihan Umum di Era Reformasi tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Penelitian disertasi penulis (Osbin Samosir) menunjukkan fakta dan data-data itu. Maka bisa juga diutarakan pertanyaan, adakah unsur primordial dalam keterpilihan caleg-caleg Kristen di basis Islam yang kuat? Dan bagaimana itu bisa terjadi?

2. Lahirnya Kepentingan Politik Primordial

Bagaimana munculnya politik primordial? Mengapa politik primordial kerap dipakai dan muncul dalam politik untuk memenangkan sebuah pertarungan politik untuk penentuan kemenangan perwakilan politik tertentu? Menurut Clifford Geertz, seorang antropologist Amerika yang banyak meneliti tentang Indonesia, dominasi kelompok kepentingan politik tertentu terhadap kepentingan yang lebih lemah cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bersifat primordial. Artinya, setiap kepentingan politik tergantung dari seberapa besar adanya dominasi politik dari sekelompok masyarakat terhadap kelompok yang lebih lemah. Dominasi itu sendiri cenderung berciri primordial. Ketika kepentingan kelompok yang lebih lemah terabaikan dan tersingkirkan dari kehadiran kelompok yang lebih dominan, dan jika dibiarkan terus menerus dan terabaikan, maka perlahan-lahan akan tumbuh kehendak politik berciri primordial baru lagi, dan demikian seterusnya.

Bahkan dalam fakta-fakta paling umum, lahirnya konflik politik di negara-negara berkembang cenderung justru disebabkan oleh adanya perbedaan dan pertentangan yang didasarkan pada ikatan-ikatan primordial. Ikatan-ikatan primordial bisa menjadi sangat sensitive yang kerap tidak terhindarkan kemunculannya jika tidak dikelola dengan baik menjadi bara api besar untuk sebuah perpecahan jika isu-isu primordial bercampur dan masuk ke dalam wilayah politik. Isu primordial menjadi sangat mudah untuk tersulut menjadi nyala api besar yang tak terpadamkan khusunya bagi negara-negaa yang baru merdeka dari tangan kolonialisme, termasuk di negara-negara berkembang. Isu primordialisme menjadi sangat laku dan bertumbuh subur di kalangan masyarakat yang tertinggal, miskin, kurang terdidik yang memudahkan warga lebih menggunakan rasa perasaan menghadapi situasi politik daripada menggandalkan akal budi atau nalar sehat. Isu primordial menjadi mudah tersulut api kecil karena memang ikatan primordial sangat merekatkan sesama warga dan kelompok masyarakat atas dasar daerah asal, garis keturunan, dan iman kepercayaannya.

Menurut Clifford Geertz, ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang yang disebabkan oleh keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu, sehingga ikatan primoridial tidak dihasilkan oleh hubungan sosial yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan

orang lain.[19] Artinya, ikatan primordial itu bukan muncul kemudian sebagai hasil karya dan ciptaan seseorang sesudah dia lahir sebagai manusia, tetapi *in se* dalam dirinya sudah terbawa sejak sebelum ia lahir dan hanya menerimanya di saat kelahirannya tanpa ada kewenangan untuk memilih hal sebaliknya atau pilihan lain yang dikehendakinya kemudian setelah seseorang dewasa.

Menurut Maswadi Rauf, seorang Mahaguru Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, analisis Clifford Geertz mengenai konflik politik dan stabilitas politik di negara-negara yang baru terbentuk, ditinjau dari kesetiaan primordial dan kelompok primordial, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Terkait dengan studi Clifford Geertz mengenai sentimen primordial di negara-negara berkembang yang mempunyai pengaruh luas, Maswadi mengatakan,[20]

> "Geertz mempelajarinya dari sudut keterikatan anggota-anggota masyarakat terhadap kelompok primordial mereka masing-masing. Dengan mempelajari kelompok-kelompok primordial dan kesetiaan warga masyarakat terhadap kelompok-kelompok primordial, terbukalah sebuah cakrawala baru dalam konflik politik di Negara-negara berkembang, yang untuk konteks Indonesia pada dasawarsa 1950an dan 1960an."

---

[19] Clifford Geertz, *Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Afrika*, (New York: The Free Press, 1963), hlm. 105-157.

[20]Maswadi Rauf, Guru Besar Fisip UI, *Konsensus Politik. Sebuah penjajagan teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 58.

Fakta-fakta sangat kuat dalam sepuluh hingga dua puluh tahun pertama sejak kemerdekaan Indonesia sangat terlihat jelas bagaimana ikatan-ikatan primordial tersebut sangat kuat dan mengakar. Fakta itu bisa terlihat misalnya dari jatuh bangunnya pemerintahanan parlementer Indonesia di tahun 1950 an. Saat itu, pemerintahan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri hanya berusia sangat singkat oleh jatuh bangunnya antara kabinet yang satu terhadap kabinet yang lain oleh pertikaian politik primordial masing-masing partai. Bahkan dalam Pemilu pertama tahun 1955, pemenang pemilu dalam sepuluh besar mayoritas diisi oleh partai-partai berbasiskan primordial, mulai dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, hingga Parkindo, dan Partai Katolik. Sangat kuatnya isu-isu primordial membuat perjalanan negara menapaki daratan kemerdekaannya tidak semudah seperti dicita-citakan para *founding fathers* ketika mereka merumuskan ideologi negara Pancasila dan susunan/tatanan hirarki lainnya kenegaraan Indonesia sejak Mei hingga Agustus 1945.

Maswadi Rauf menjelaskan bahwa kelompok primordial memainkan peranan penting dalam teori konflik Geertz karena teori tersebut dibangun atas konsep primordial. Istilah itu menghasilkan beberapa istilah lain yang berhubungan erat, seperti ikatan primordial, sentimen primordial, dan kesetiaan primordial. Ikatan primordial membuat sekelompok masyarakat menjadi satu kesatuan primordial yang terikat oleh hubungan darah, agama yang sama, atau asal muasal daerah, dan lain-lain. Sentiment primordial melahirkan rasa perasaan ikut terusik atau terluka ketika salah seorang atau sejumlah anggota dari ikatan primordial tersakiti atau terluka atau penting mendapatkan perhatian serius. Sementara kesetiaan primordial merupakan ungkapan hati untuk menerima dan

melaksanakan apapun yang menjadi kesepakatan bersama kelompok, yang ketaatan itu muncul bukan terutama karena topik atau materi yang disepakati, tetapi lebih karena ada ikatan-ikatan yang *given* di antara sesama anggota yang tak akan pernah bisa dihilangkan.

3. Sifat Alami Kelompok Primordial

Bentuk kelompok primordial bisa dikategorikan secara sederhana sebagai kelompok yang lebih besar dari keluarga namun ia lebih kecil dari bangsa yang didasarkan atas ikatan primordial. Terkait dengan itu, Maswadi menjelaskan[21]

> "Yang dimaksud dengan ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang bersangkutan) yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat."

Penjelasan Maswadi di atas semakin menegaskan bahwa memang ikatan primordial itu bukan karena diciptakan dan diperoleh dari proses berjalannya kehidupan setiap orang, tetapi lebih karena memang diterima begitu saja dari generasi yang lebih dewasa yang kemudian diturunkan ke dalam diri setiap orang. Ikatan primordial itu bisa dalam bentuk keyakinan karena agama, ikatan daerah karena suku yang sama, juga karena daerah asal yang sama dengan bahasa dan adat istiadat yang serupa. Semua butir - butir dasariah itu menjadi prinsip yang mengikat erat setiap

[21] Rauf, *op.cit.*, hlm. 62

kelompok primordial. Terkait sumber ikatan primordial sebagaimana disampaikan di atas dipertegas lagi oleh Maswadi, [22]

> "Ikatan primordial bersifat alami karena diterima oleh seseorang disebabkan keberadaannya dalam kelompok primordial tertentu. Jadi ikatan primordial tidak dihasilkan oleh hubungan sosial yang dilakukan oleh orang bersangkutan dengan orang lain. […] kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai budaya yang dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Sebuah kelompok yang keanggotaannya didasarkan atas persamaan ras/suku dan/atau agama dapat dikategorikan sebagai kelompok primordial."

Terkait dengan hal tersebut di atas, Maswadi menjelaskan juga bahwa orang yang berasal dari suku tertentu umpamanya akan mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama, meskipun tidak persis selalu sama, ada kemungkinan mereka juga berasal dari daerah yang sama. Kelahiran seseorang dalam kelompok ras atau suku tertentu sudah jelas bukanlah pilihan orang bersangkutan karena ia menerima kenyataan itu sebagaimana adanya. Ia dilahirkan oleh orang tua yang tidak bisa dipilih oleh orang yang bersangkutan sehingga ia tidak berperan dalam menentukan dimana ia dilahirkan. Kita tidak bisa memilih dalam suku apa kita dilahirkan. Sebagaimana dikatakan oleh Maswadi,[23] inilah yang dimaksudkan oleh Geertz sebagai sifat alamiah dari kelompok primordial.

---

[22] Geertz, *op.cit.,* hal 109-110.
[23] Rauf, *op.cit.*.

Berbeda dengan primordialisme suku atau ras, primordialisme agama justru tidak sesuatu yang harus tetap tapi bisa berubah. Primordialisme agama tergantung dari pilihan yang bersangkutan kelak terhadap agama yang menurutnya patut untuk dipegangnya. Lebih jauh tentang primordialisme agama, Maswadi menjelaskan,[24]

> ”Nilai primordial yang terkandung dalam agama sebenarnya sedikit berbeda dari ras/suku. Memang benar seseorang tidak bisa memilih agama dari keluarga di mana ia dilahirkan. Tapi seorang pemeluk agama tertentu bisa saja berpindah agama sehingga ia beralih atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial atas dasar agama tertentu ke kelompok primordial atas dasar agama yang lain. Dalam hal suku atau ras, seseorang tentu saja tidak bisa berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai anggota kelompok ras atau suku tertentu tetapi melekat pada dirinya meskipun ia tidak mau mengakuinya.”

Kelompok primordial didasarkan atas persamaan beberapa nilai dapat dikategorikan secara umum menjadi dua, yakni ras/suku dan agama. Persamaan rasa atau suku akan menghasilkan persamaan-persamaan kultural lainnya seperti persamaan bahasa, adat istiadat, dan kedaerahan. Sehingga orang-orang yang berasal dari suku tertentu mempunyai bahasa dan adat istiadat yang sama.[25]

Pandangan Maswadi di atas menunjukkan bahwa primordialisme agama dan suku adalah dua hal terpokok yang pertama sekali menyentuh kehidupan manusia. Dalam fakta sosial politik Indonesia, kedua isu politik agama dan

[24] *Ibid.,* hlm. 62-63.
[25] *Ibid.,* hal 62-64.

politik suku menjadi teramat sensitive hingga saat ini. Lahirnya kelompok-kelompok garis keras atas nama agama seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI), termasuk bom bunuh diri atas nama agama, adalah gambaran dari betapa sangat sensitifnya isu-isu primordial dalam peta sosial politik Indonesia dewasa ini. Isu primordial dalam tataran sosial politik sudah muncul dalam sejarah Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, sebagaimanaa terjadi misalnya dalam sidang-sidang Volksraad seperti dialami oleh IJ Kasimo, seorang politisi Katolik dalam sidang Volksraad tahun 1933 terhadap tuduhan anggota Volksraad sebangsanya sebagai antek antek asing hanya karena Kasimo seorang Nasrani.

Bagi Clifford Geertz, unsur primordialisme, entah suku, agama atau antar golongan "tidak hanya memainkan peranan yang integratif dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat, tetapi juga memainkan peranan memecah dan dengan begitu mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif dan disintergratif."[26] Fakta Indonesia dimasa-masa awal kemerdekaan setidaknya hingga lima belas tahun pertama kemerdekaan (1945-1960 an) oleh jatuh bangunnya cabinet, sidang konstituante penentuan Undang-Undang Dasar Indonesia yang berlarut-larut sejak November 1956 s/d 5 Juli 1959 dan berakhir gagal, dan banyaknya pemberontakan lokal, menunjukkan upaya-upaya disintegrasi tersebut.

Fakta-fakta yang sama dalam masa-masa awal Reformasi sejak kejatuhan Presiden Soeharto Mei 1998, upaya disintegrasi itu sangat menguat di masa masa sepuluh tahun pertama lahirnya Era Reformasi oleh

[26] Geertz, *op.cit.,* hlm. 475.

kebebasan publik yang sangat dominan di tengah-tengah sangat lemahnya kewenangan dan keberadaan Lembaga eksekutif, sesuatu yang sangat berkebalikan 180 derajat dengan hegemoni kewenangan eksekutif yang otoriter di masa pemerintahan Presiden Soeharto Orde Baru.

4. Dampak Kelompok Primordialisme

Terkait dengan loyalitas di antara dua primordialisme sebagaimana sudah disebutkan di atas, terdapat perbedaan masing masing primordialisme baik agama maupun suku. Terkait dengan perbedaan dimaksud, Maswadi menjelaskannnya demikian,[27]

> "Meskipun Geertz tidak membedakan sifat-sifat alamiah dari ikatan ras/suku dari sifat-sifat alamiah dari ikatan agama, sebenarnya ada perbedaan antara keduanya dalam hal sumber kesetiaan/loyalitas. Yang tercermin dari tulisan Geertz adalah bahwa kedua ikatan primordial tersebut membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antara sesama anggota kelompok."

Geertz mengakui bahwa kedua sentiment ikatan primordial atas nama agama dan atas nama suku menciptakan sentiment dan loyalitas primordial. Terkait solidaritas primordial atas dasar suku, Geertz menjelaskannya demikian:[28]

> "Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya […] yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan kepentingan yang sama.

[27] Maswadi, *op.cit.,* hlm. 63.
[28] Maswadi, *op.cit.,* hlm. 63.

> Semua persamaan ini menghasilkan solidaritas yang amat kuat diantara anggota-anggota yang membuat mereka bersedia membela kelompok mereka dengan pengorbanan apapun."

Berbeda dari sumber solidaritas primordial atas nama suku atau etnis, sumber solidaritas primordial atas nama agama ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada wujud Tertinggi, Sang Ilahi, atau Tuhan sesuai dengan kebenaran ajaran-ajarannya. Ikatan primordial atas nama agama bisa berubah sesuai dengan kematangan kesadaran dari setiap orang atas iman yang diyakininya sampai setiap orang benar-benar yakin bahwa pilihan imannya adalah pilihan iman paling tepat dalam hidupnya. Terhadap solidaritas primordial atas nama agama Geertz menjelaskannya demikian:[29]

> "Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan kebenaran ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun. Di samping itu, persamaan kepentingan dan kegiatan sehari-hari karena persamaan agama menambah kuat solidaritas antara anggota-anggota kelompok primordial agama. Sebagai contoh, keinginan beribadah atau memperingati hari besar agama merupakan unsur

[29] *Ibid.*

penting dalam memperkuat solidaritas diantara pemeluk agama yang sama."

Nilai primordial yang terkandung dalam agama sedikit berbeda dari ras/suku. Seseorang tidak bisa bebas memilih suku dari keluarga dimana ia dilahirkan. Kelahiran karena darah tetap melekat dalam dirinya sebagai keturunan dari suku tertentu dan tak bisa diubah atau diganti-ganti. Tetapi seorang pemeluk agama tertentu masih bisa berpindah agama atas dasar pilihannya sendiri dari sebuah kelompok primordial agama tertentu ke kelompok primordial agama yang lain. Sementara dalam hal suku atau ras, seseorang tidak bisa berpindah ras atau suku karena statusnya sebagai anggota kelompok ras atau suku tertentu tetap melekat meskipun ia tidak mau mengakuinya.

Kedua ikatan primordial tersebut akan membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat di antara sesama anggota kelompok. Solidaritas primordial dalam kelompok ras/suku ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir, dan kepentingan yang sama. Persamaan-persamaan ini membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun. Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan ajaran-ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama bersangkutan yang menimbulkan kerelaaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun.[30]

[30] *Ibid.,* hal 62-64.

Untuk mempertajam pemahaman terkait kedua primordialisme tersebut, Maswadi memberikan catatan bahwa primordialisme agama sangat berbeda dengan primordialisme budaya atau suku. Perbedaan mendasar antara kedua primordialisme tersebut disampaikan Maswadi demikian,[31]

> "Juga perlu diberikan catatan di sini bahwa nilai-nilai agama tidaklah sepenuhnya sama dengan nilai-nilai budaya meskipun dalam agama ada unsur-unsur budaya. Karena dalam nilai-nilai agama terkandung unsur-unsur ilahiah yakni nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang tidak dihasilkan oleh interaksi sosial. Padahal nilai-nilai budaya adalah produk manusia dalam berinteraksi dengan sejumlah manusia lainnya dalam masyarakat."

Peranan ikatan primordial sangat kuat sehingga Geertz menyatakan bahwa kesetiaan primordial lebih kuat dari pada kesetiaan politik. Maswadi Rauf menguraikannya secara rinci bahwa kesetiaan politik adalah kesetiaan yang relative tidak kekal. Kesetiaan terhadap partai politik atau pemimpin politik seharusnya didasarkan atas kinerja *(performance)* yang ditunjukkan oleh mereka. Seseorang bisa saja mendukung partai politik atau pemimpin politik mana saja. Bila orang menganggap bahwa partai dan pemimpin politik tidak mampu membela dan memperjuangkan kepentingannya, dia berhak menarik dukung terhadap partai politik atau pemimpin politik tadi lalu mengalihkannya kepada partai politik dan pemimpin politik lainnya. Jadi kesetiaan politik bersifat pragmatis

[31] *Ibid.*

yakni berdasarkan kenyataan yang terjadi yakni apa yang dilakukan oleh partai politik atau pemimpin politik.[32]

5. Menolak Isu Primordial dalam Politik Praktis

Hakekat kesetiaan primordial berbeda dari kesetiaan politik. Kesetiaan primordial bersifat alami sehingga sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Dalam kesetiaan ini, dukungan kepada anggota-anggota kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak didasarkan atas pertimbangan rasional (seperti penilaian terhadap kinerja) tetapi pada pertimbangan emosional dan perasaan.[33] Lalu bagaimana kalau primordialisme memasuki ranah politik? Bukankah fanatisme politik akan terjadi karena ia dipengaruhi oleh kesetiaan primordial?

Menurut Geertz,[34] penggunaan nilai-nilai primordial dalam politik harus dihindari. Geertz menginginkan agar kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial tidak dicampurkan karena merupakan dua hal yang berbeda. Terkait dengan bahaya primordialisme dalam politik, Maswadi menjelaskannya demikian,[35]

> "Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Fanatisme ini memperkuat integrasi kelompok, namun, sebaliknya mempermudah terjadinya konflik dengan orang lain

---

[32] *Ibid.,* hal 68.

[33] *Ibid.*

[34] Geertz dalam Juwono Sudarsono "Ikatan-ikatan Primordial dana Politik Kebangsaan diNegara-negara Baru" dalam Juwono (editor) *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hal 110.

[35] Maswadi *op.cit.,* hlm. 64.

di luar kelompok primordial. Bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primordial akan membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati, bahkan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu pengorbanan, baik harta benda maupun nyawa dapat saja terjadi. Itu dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan."

Maswadi Rauf melihat ada tiga dampak penting dari penggabungan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial.[36] *Pertama,* penggabungan tersebut menghasilkan perubahan dalam kesetiaan politik karena kesetiaan politik menjadi fanatik dan tidak bisa berubah. Pemimpin politik yang didukung oleh kesetiaan politik fanatik seperti itu akan mempersulit pengawasan terhadap pemimpin, yang membuat sang pemimpin cenderung melakukan tindakan-tindakan politik menurut keinginan sendiri. Biasanya pemimpin yang mengandalkan dukungan politik fanatik merasa dirinya selalu benar karena pendukungnya selalu menganggap ia benar. Pemimpin seperti itu selalu menggangap dirinya benar karena para pendukungnya tidak mau memberikan kritik dan tidak berani menyampaikan masukan dan saran. Jelas bahwa pencampur-adukan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial menghasilkan suasana yang tidak kondusif bagi berkembangnya demokrasi.

Kedua, pencampur-adukan kesetiaan primordial dan kesetiaan politik menyebabkan pencampur-adukan isu politik dan isu primordial. Kritik terhadap pemerintah karena ketidak-mampuan pemerintah adalah semata-mata

[36]*Ibid.,* hal 68-69.

isu politik. Tapi di negara-negara baru, isu politik itu sudah diwarnai oleh isu primordial karena beberapa politisi oposisi menyebutkan adanya diskriminasi terhadap suku atau agama tertentu oleh pemerintah, terjadinya ketidak-adilan terhadap daerah-daerah oleh pemerintah, atau pemanfaatan kekuasaan politik oleh suku tertentu untuk kepentingan suku bersangkutan yang menimbulkan penderitaan bagi semua rakyat. Tidak mengherankan bila isu politik dengan segera mendapat reaksi dan dukungan dari kelompok primordial yang merasa dirugikan dengan mengadakan gerakan-gerakan politik menentang pemerintah, bahkan menentang Negara-bangsa.

Ketiga, penggabungan tuntutan politik dan tuntuan primordial adalah mudahnya dilakukan manipulasi dukungan kelompok primordial oleh para pemimpin politik untuk kepentingan politik. Dukungan terhadap isu-isu primordial adalah alamiah karena solidaritas dan ikatan primordial itu sendiri bersifat alamiah. Isu politik berwarna oleh isu primordial akan menghasilkan dukungan fanatik dari kelompok primordial bersangkutan yang dapat digunakan oleh pemimpin politik memperkuat dukungan politik terhadap mereka. Salah satu persoalan utama dalam politik adalah bagaimana caranya memperbesar dukungan dari rakyat. Ikatan primordial merupakan alat yang ampuh untuk menarik dukungan dari anggota kelompok primordial. Mereka lebih tertarik pada usaha-usaha untuk membela kepentingan primordial, daripada usaha-usaha mewujudkan kepentingan politik. Namun dalam kenyataannya, kedua hal tersebut sulit dibedakan sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh pemimpin politik.

Pandangan Clifford Geertz dan Maswadi Rauf tersebut membawa kita untuk merefleksikan ulang apakah situasi politik nasional Indonesia dalam penentuan

presiden, para kepala daerah dan anggota legislative sejak Pemilu 1999 hingga saat ini masih tetap akan mengusng-isu-isu primordialisme politik? Mungkin setiap orang akan mulai berargumentasi bahwa isu-isu primordialisme politik dalam bungkus politik identitas kelak akan hilang dengan sedirinya sesuai usia kematangan masyarakat berdemokrasi.

6. Penutup

Sangat mungkin kita mengatakan bahwa isu primordialisme dalam politik Indonesia kedepan tidak cukup kuat lagi, atau malah justru peta politik Indonesia ke dapan masih akan terus dicampur dengan isu-isu primordial khususnya atas nama agama dan suku.

Jika kecemasan akan hadirnya primordialisme politik masih menjadi format sistem perwakilan politik Indonesia ke depan, maka penting untuk berkaca bagaimana politik aliran sesungguhnya menjadi pola yang sudah tidak asing sejak dahulu dalam sistem perwakilan politik Indonesia. Bab berikut akan membahasnya, bagaimana politik aliran dan ketaatan pada figur pemimpin dalam paham Indonesia sudah terjadi di desa-desa Indonesia jauh sebelum Era Reformasi.*****

BAB 5
POLITIK ALIRAN, FIGUR PEMIMPIN DAN NASIONALISME

1. Pengantar

Pokok pikiran yang disampaikan oleh Alan Ware tentang pentingnya kehadiran figur atau sosok politik yang mampu menarik simpatik publik yang akan menjadi andalan setiap partai untuk meraup suara pemilih, ternyata dalam peta politik Indonesia di masa lalu kehadiran figure pemimpin karismatik menjadi penentu keterpilihan seseorang. Tentu dari kacamata Anne Philips yang melihat bahwa kehadiran politik secara riil di Lembaga-lembaga negara dari pihak-pihak yang merasa diri terpinggirkan atau terkucil selama ini sebagai bentuk *politics of presence* tanpa perlu diwakilkan ke pihak-pihak yang tidak berasal dari rumpun yang sama semakin menguatkan bahwa politik aliran dalam koteks Indonesia pun tidak berbeda jauh dari maksud Anne Philips akan pentingnya *politics of presence*. Kekuatan-kekuatan politik dalam setiap aliran akan sangat menentukan seberapa kuat dan seberapa berdampak kehadiran aliran-aliran politik mampu menghasilkan figure atau keterwakilan politiknya.

Maka uraian tentang primordalisme politik yang dipikirkan oleh Clifford Geertz dan Maswadi Rauf membawa kita pada pemahaman akan menguatnya aliran-aliran politik yang sesungguhnya telah terjadi di Indonesia. Dalam bahasa sederhana Affan Gaffar yang

telah melakukan penelitian tentang para pemilih di Pulau Jawa di masa pemerintahan Orde Baru telah membuktikan bahwa politik aliran di Indonesia sangat berpengaruh untuk penentuan keterwakilan politik. Penelitian Affan Gaffar di Pulau Jawa di masa Orde Baru akan menjadi pokok bahasan berikut yakni bagaimana politik aliran dan ketaatan pada figur pemimpin telah menjadi sangat menentukan dalam paham keterwakilan politik di Indonesia.

2. Prinsip Determinan Sosial, Agama, dan Budaya

Bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affan Gaffar tentang keterpilihan calon legislative (caleg) dalam pemilu di Pulau Jawa di masa Orde Baru, keterpilihan caleg dalam Pemilu di Indonesia ternyata cenderung dipengaruhi oleh dua aspek, yakni pengaruh kuat politik aliran dan ketaatan pada figur pemimpin.[37] Penelitian Affan Gaffar di Kecamatan Brobanti Yogyakarta, yang berfokus di tiga desa yakni: Sukaramai, Sukadamai, dan Sukamulya membuat hipotesis bahwa politik aliran masih sangat dominan dalam penentuan pilihan politik bagi masyarakat di desa-desa Pulau Jawa. Gaffar menjelaskannya demikian,[38]

> *"The principle working hypothesis in this is that social religio-cultural belief are the principal determinant in explain electoral behavior in Javanese villages. The religio-cultural beliefs are inculcated and are transmitted from generation to generation through the process of political socialization, which eventually*

[37]Afan Gafar, *Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 27

[38] *Ibid,* hlm. 24.

lead to the establishment of an individual's identification with a certain political party and social organization. Santri people will identify with a political party that promotes Islamic values and norms, while the Abangan will identify with a secular or non-Islamic party."

["Prinsip bekerjanya hipotesis di sini adalah bahwa keyakinan socio religio kultural merupakan prinsip determinan dalam menjelaskan perilaku pemilih. Keyakinan religio kultural sudah mendarah daging dan diwariskan turun temurun melalui proses sosialisasi politik yang kemudian memperkuat identifikasi individu dengan partai politik dan organisasi sosial tertentu. Orang-orang Santri akan mengidentifikasi diri dengan sebuah partai politik yang mempromosikan nilai-nilai dan norma Islam, sementara Abangan akan mengidentifikasi diri dengan partai secular atau partai non Islam."]

Gaffar menunjukkan pola hubungan bahwa perspektif aliran sangat berpengaruh dalam penggunaan pilihan politik di pedesaan Jawa. Gaffar mengutip pandangan Clifford Geertz bahwa desa di Jawa kebanyakan terbentuk dalam pola aliran. Aliran terdiri dari parpol yang dikelilingi oleh organisasi-organisasi yang secara formal atau informal terhubung dengannya dan memiliki arah dan pendirian ideologi yang sama. Temuan itu ditunjukkan oleh Gaffar lewat studinya yang melihat hubungan antara pola kepemimpinan dan perilaku pemilih. Gaffar menjelaskan,[39]

[39] *Ibid,* hlm. 156-157.

"Through the analysis I have attempted to uncover the relationship between the pattern of leadership and voting behavior in Brobanti. One important contribution of the finding in this chapter, I believe, is the empirical analysis that supports Geertz's earlier notion that leadership has its own political and social constituency based on socio-religious orientation. The followers will be inclined to engage in political affairs based on the concordance of their attitudes with the leader. […] My data clearly indicate that religion, as ideology, is the most critical linkage between the leader and its followers. […] This study also indicates that villagers do not blindly follow their leaders instruction, order, advice, or suggestion. In Sukaramai village, for example, the majority of respondents have a strong attachment to a religious leader voter for Golkar, the government party."

["Melalui analisis itu, saya harus mencoba relasi yang tidak tertutupi di antara pola kepemimpinan dan perilaku pemilih di Brobanti. Satu kontribusi penting dari temuan dalam bab ini, saya percaya, analisis empiris yang mendukung gagasan terbaru Geertz bahwa kepemimpinan memiliki konstituen sosial dan politiknya sendiri yang didasarkan pada orientasi sosial religius. Para pengikut akan cenderung untuk ikut dalam urusan politik didasarkan pada rekomendasi dari pertimbangan para pemimpinnya. […] Dataku dengan jelas mengindikasikan bahwa agama, sebagai ideologi, adalah jaringan yang paling kritis di antara pemimpin dan para pengikutnya. […] Studi ini juga

mengindikasikan bahwa orang-orang desa tidak dengan buta mengikuti instruksi, perintah, kebijakan atau pengandaian pemimpin mereka. Di desa Sukaramai, misalnya, mayoritas responden memiliki lampiran/pertimbangan yang kuat terhadap pilihan pemimpin agama bagi Golkar, partai pemerintah."]

Aliran lebih daripada parpol atau sekadar ideologi. Ia sudah menjadi suatu pola integrasi sosial. Konsep aliran mengacu pada cara berpikir orang Jawa khususnya yang didasarkan pada pola relijius-kultural yang dinyatakan dalam aspek trikotomi Santri, Abangan, dan Priayi. Betapa kuatnya peranan politik aliran agama dalam penentuan pilihan dijelaskan oleh Gaffar demikian,[40]

> *"From the analysis, one can see that there is a close relationship between individual socio-religious orientation and voting preference. The data from Brobanti indeed support the notion that people are inclined to vote according to their socio-religious orientation. Thus, Santri will be inclined to vote for the Islamic party, while Abangan will tend to support a secular party in the elections. The stability of the pattern of voting preference is clear in the analysis. The Santri voters seem to be more ideological in making the voting decision than the Abangan. What is interesting is that quite a number of them also voted for Golkar. Nevertheless, other variables have also to be taken into account, such as*

[40] *Ibid,* hlm. 130. Argumentasi yang sama bisa juga ditelusuri dalam East Vlesenthal - Abraham Bridgestahl, *Politic Behaviour* vol 7 no 4, tahun 1997 hal 321-324.

the pattern of leadership and class. The following chapters will explore those variables in relation to voting in Javanese villages such as in Brobanti."

["Dari analisis itu, seseorang dapat melihat bahwa ada hubungan yang sangat dekat di antara orientasi sosio religious individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Yang penting adalah bahwa agaknya sejumlah dari mereka juga memilih ke Golkar. Namun demikian variable lain juga diambil kegunaannya, seperti pola kepemimpinan dan pola kelas sosial. Bab berikutnya akan mengeksplorasi variable itu dalam kaitan dengan pemilih di desa-desa Jawa demikian seperti di Brobanti."]

Pola hubungan kedua adalah pola hubungan pemimpin dan pengikut melalui otoritas tradisional di mana paternalisme merupakan fenomena umum dalam masyarakat Jawa. Menurut Gaffar konsep otoritas tradisional ialah: praktek kekuasaan personalistik yang terakumulasi melalui pengaruh masa lalu dan sekarang yang mengambil peran sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai, dan pemegang status yang tinggi

dalam hubungan ketergantungan yang telah diciptakan. Variabel memilih di pedesaan Jawa menunjukkan bahwa keyakinan sosio-relijius jauh lebih kuat dibandingkan pola hubungan kelas dalam penentuan pilihan politik warga. Gaffar menjelaskan, [41]

> *"Through the analysis I have attempt to demonstrate whether class affiliation does have an important effect on voting behavior in Brobanti Villages. As indicated by the available data from the study, it is clear that class is less significant in explaining electoral behavior in those villages. Rather, it is the cultural variable that has a more significant role. The reason is that, first, in a small scale agricultural economy such as in Java in which the strong landlord does not exist as well as the relative independence of the peasant from the market economy, the non-economic factors such as religion are more prominent than class. Second, the nonexistence of interest groups that promoter farmers interest along with the unification of peasant organization to protect the interest of the corporatist state make if impossible to create "class consciousness" among the peasants in Javanese villages."*
>
> ["Melalui analisis itu saya sudah mencoba mendemonstrasikan entah afiliasi kelas sosial memiliki efek penting dalam perilaku pemilih di desa Brobanti. Sebagaimana diindikasikan oleh data tersaji dari studi itu, jelas bahwa kelas sosial kurang signifikan dalam menjelaskan perilaku pemilih di desa-desa itu. Agaknya variable cultural memiliki

[41] Gaffar, *op.cit,* hlm. 173.

peranan lebih signifikan. Alasan bahwa, pertama, dalam ekonomi agrokultural berskala kecil seperti di Jawa di mana tuan tanah yang kuat tidak ada, sedemikian baik seperti kebebasan relative warga dari ekonomi pasar, faktor-faktor non ekonomi seperti agama menjadi lebih kuat dari pada faktor kelas sosial. Kedua, ketidak-beradaan kelompok kepentingan yang mempromosikan kepentingan petani sepanjang kesatuan dengan organisasi petani untuk melindungi kepentingan dari korporasi pemerintah membuatnya menjadi tidak mungkin menciptakan "hati nurani yang berkelas" di antara para petani di desa-desa Jawa."]

Penelitian Gaffar di daerah Brobanti Yogyakarta menunjukkan peran lembaga agama seperti masjid dan langgar sangat kuat di antara kaum Santri dan sebaliknya berlaku di kalangan Abangan. Lembaga agama adalah unit paling dasar dalam pendidikan kaum Santri. Sementara kaum Abangan tidak memiliki lembaga semacam itu. Bahkan mereka enggan pergi ke pertemuan-pertemuan di langgar atau masjid karena mereka menganggap langgar sebagai milik komunitas Santri. Dalam lembaga ini terjadi ikatan yang erat antara pemimpin agama (kyai, haji) dengan ummat.

3. Keterwakilan Politik di Golkar, PPP, dan PDI

Studi Gaffar ini terutama menjelaskan bahwa di pedesaan Jawa, orang cenderung memilih berdasarkan keyakinan sosio-religious. Yakni kaum Santri lebih memilih partai Islam, dan Abangan lebih memililih partai yang tidak menganjurkan keyakinan Islam seperti PDI. Dari Pemilu

1971 dan 1977 dilaporkan kecenderungan yang sama perihal pilihan responden.[42]

Alasan memilih yang dikemukakan oleh Gaffar adalah bahwa di antara pemilih PDI, tampaknya tidak terdapat alasan ideologis yang jelas. Sekitar 32% responden memilih PDI dengan alasan karena tidak suka PPP dan Golkar. Maka ada kecenderungan di antara pemilih PDI yang anti kemapanan pemerintah dan partai Islam. Alasan lainnya memilih PDI karena tekanan pertemanan, yaitu untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain. Alasan ketiga, karena warisan kejayaan Soekarno masih popular di kalangan pemilih PDI. Alasan utama responden memilih Golkar karena citranya sebagai partai pemerintah. Gaffar menyimpulkan hasil penelitiannya demikian, [43]

> *"What are the implications of this finding? First, this study does not seem to support earlier studies of voting behavior in western political democracy. These studies indicated that elections are in expression of class struggle. Second, this study has also contributed to the continuing debate among scholars (Indonesian specialist) whether class or culture has more explanatory power in giving an account for Indonesian or Javanese politics. This study clearly indicates that class has nothing to do with individual behavior in Javanese villages, at least when the cast their ballots in election."*

---

[42] *Ibid,* hlm. 152. Lihat juga *Membina Hubungan, op.cit.,* hal 48-54. Lihat juga Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princenton University Press, 1980) hlm. 7.

[43] *Ibid,* hlm. 173-174. Argumentasi tentang hal ini dapat juga ditelusuri dalam *Membina Hubungan dengan Konstituen, Seri Penguatan Legislatif* (USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support Program), hal 1-2.

> ["Apa implikasi dari temuan ini? Pertama, studi ini tidak perhatian untuk mendukung studi-studi terbaru tentang perilaku pemilih dalam demokrasi politik Barat. Studi-studi ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum ada dalam ekspresi perlawanan kelas. Kedua, studi ini juga berkontribusi untuk melanjutkan debat di antara ilmuwan (khususnya Indonesia) entah kelas atau budaya memiliki kekuatan penjelasan yang lebih besar dalam memberikan sebuah kegunaan bagi politik Jawa dan Indonesia. Studi ini secara jelas mengindikasikan bahwa kelas tidak memiliki apapun terkait perilaku pemilih di desa-desa Jawa, sekurang-kurangnya ketika mereka menjatuhkan pilihan rahasia dalam Pemilu."]

Data di Brobanti, Yogyakarta menunjukkan hampir 40% responden memilih Golkar karena mengikuti jejak pemimpin mereka, yakni lurah, kepala dukuh, dan lain-lain. Mereka ingin mengidentifikasikan diri dengan pemimpin mereka. Peran kepala dukuh sangat besar dalam memobilisasi massa, sebab 22% pemilih Golkar mengatakan mereka diminta untuk itu. Golkar juga diuntungkan karena diasosiasikan dengan Sultan Yogyakarta, yang adalah ketua Golkar Yogyakarta. Pengikut partai Islam (PPP) adalah responden yang terlihat paling ideologis. Hampir 33% responden memilih PPP karena merasa memilih partai Islam merupakan keharusan selaku Muslim. Sepertiga pemilih PPP juga mengatakan mereka memilih karena diminta pemimpin mereka. Pemimpin Islam mampu

meyakinkan pengikutnya bahwa memilih partai Islam itu bagian dari ibadah.[44]

Faktor kepemimpinan dan perilaku memilih menunjukkan bahwa pemilih yang lebih terikat pada pejabat desa akan lebih memilih partai pemerintah (Golkar) daripada mereka yang terikat pada pemimpin agama yang akan mendukung partai Islam (PPP). Bila orientasi sosio-relijius dijadikan faktor kontrol dalam analisis ini, sekitar 86% responden Abangan yang terikat pada pejabat desa memilih Golkar, dan hampir setengah jumlah Santri dari kategori yang sama memilih PPP. Partai pemerintah tidak pernah dapat menembus komunitas Santri di desa ini, karena itu Golkar tidak pernah menang. Di Sukaramai yang pemimpin formal-nya kuat berpengaruh dan mendukung Golkar, partai-partai oposisi selalu kalah.[45] Mengapa demikian, karena mayoritas pejabat desa di tiga desa ini adalah Santri juga. Jadi ideologi memainkan peran penting dalam menghubungkan perilaku antara pemimpin politik dan konstituennya.

Temuan Gaffar di atas sangat terkait dengan teori politik yang digagas oleh James Scott tentang politik patron-klien. James Scott mengemukakan bahwa dalam politik terdapat pola hubungan patron-klien yakni sekelompok figur informal yang berkuasa (patron) dan memiliki posisi memberikan rasa aman, pengaruh, atau keduanya. Menurut Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi

[44] *Ibid,* hlm. 153
[45] *Ibid,* hlm. 154.

sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.[46]

> *"Relationship in which an individual of higher socio-economis status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the person."*

Apa yang terjadi adalah ketika klien menerima kebaikan dari figure atau sosok yang dikaguminya sebaga patron, dan membalas kebaikan dan kekaguman itu dengan memberikan dukungan politik kepada figure yang dikaguminya tersebut. Pola kerjasama ini biasanya berlangsung dalam waktu yang relative panjang dan lama dan kerap akan terjadi sepanjang patron/figure Bersama dengan rakyat yang membutuhkan sebagai klien masih sama-sama saling membutuhkan satu sama lain.[47] James Scot menjelaskan demikian,[48]

> *"The patron-client relationship –an exchange reationship between roles- may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a largerly instrumental friendship in which an individual of higher socio-economic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and asistance, including personal services, to the patron."*

---

[46] James C Scott (2009) "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" dalam *The American Political Science Review* Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), hlm. 92.

[47] *Ibid.,* hlm. 96-97.

[48] *Ibid.,* hlm. 92.

Sebagai imbalannya, para pengikut (klien) memberikan loyalitas dan bantuan pribadi kepada patronnya dalam kondisi apapun, baik patronnya dalam keadaan benar ataupun menyimpang/salah. Lebih lanjut James Scott mengemukakan: [49]

> *"There is an imbalance in exchange between the two partners which expresses and reflets the disparity in their relative wealth, power and status. A client in this sense is someone who has entered an unequal exchange relation in which he is unable to reciprocates fully. A debt of obligation binds him to the patron."*

Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri.[50]

Scott menuturkan, sistem pemilu dan perjalanan politik demokrasi di kawasan Asia Tenggara sangat ditentukan oleh pola hubunga antara figure politik dan rakyat pemilih terutama dalam keterkaitan dengan pemilihan umum yang melibatkan partai politik. Peran politik patron-klien di Asia Tenggara tersebut kemudian diperjelas Scott demikian:[51]

---

[49] *Ibid.,* hlm. 93.
[50] *Ibid.,* hlm. 132.
[51] *Ibid.,* hlm. 109.

> *"This pattern could be found throughout Southeast Asia in electoral situations but is most striking in the Philippines, where most patron-client ties are centered around land-holding and elections. The Filipino politician, as Wurfel points out, does favors individually rather than collectively because he wishes to create a personal obligation of clientship."*

Salah satu pengaruh yang tampak adalah munculnya pola kekuasaan yang berbentuk piramdia bagaiamana relasi diantara kedua belah pihak sebagai figure menonjol berelasi dengan masyarakat pemilih yang dipersepsikan sebagai klien. Terkait dengan sturuktur piramida tersebut, Scott menjelaskan,[52]

> *"The introduction of competitive elections in Southeast Asia increased the pressures on regimes for the downward distribution of tangible benefits. In return for votes flowing up the vertical chain of patron-client structures, each patron depended upon the downward distribution of patronage in the form of administrative favors, land grants, public employment, and so on, in order to keep his own pyramid of followers intact."*

Relasi patron-klien atau yang biasa dikenal dengan 'patronase' (*patronage*) memaknai bahwa patron sebagai 'seseorang yang memiliki kekuasaan *(power)*, status, wewenang dan pengaruh'. Sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh.

[52] *Ibid.,* hlm. 112.

Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah, dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi. [53] Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Scott mennjelaskannya,[54]

> "*The basic pattern is an informal cluster consisting of a power figure who is in a position to give security, inducements, or both, and his personal followers who, in return for such benefits, contribute their loyalty and personal assistance to the patron's designs. Such vertical patterns of patron-client linkages represent an important structural principle of Southeast Asian politics."*

Hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang yang lebih kuat pengaruhnya dengan sejumlah pengikutnya. Hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, di mana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya. Menurut James Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya. Dalam hubungan yang bernama patron-klien, pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memang tidak seimbang. Inilah yang menjadi ciri khas dari sebuah hubungan patron-

[53] *Ibid.,* hlm. 103.
[54] *Ibid.,* hlm. 92.

klien. Jika terjadi sebaliknya, maka hubungan yang terjalin tersebut akan putus dengan sendirinya.

Lalu bagaimana partai harus bersikap dan bagaimana sistim Pemilu yang diharapkan oleh Affan Gaffar untuk konteks Indonesia? Menurut Gaffar, proses rekrutmen anggota DPR bersifat tertutup, hal itu dapat terjadi karena peranan dari kalangan elite partai yang sangat dominan di dalam menentukan siapa yang akan direkrut untuk menjadi anggota DPR. Gaffar menjelaskannya demikian,[55]

> "Pimpinan partai khususnya Ketua Partai Politik sangat menentukan siapa calon jadi untuk setiap pemilihan anggota DPR. Hal itu dilakukan dengan menentukan rangking mereka yang dicalonkan. Tidak jarang calon yang sangat populer di suatu daerah dan dicalonkan oleh partainya pada tingkat lokal diubah oleh DPP Partai dan ditempatkan pada rangking yang kiranya tidak akan mungkin terpilih. Hal itu menimbulkan konflik antara tokoh partai di daerah dengan DPP Partainya. Implikasi lanjutan dari mekanisme rekrutmen seperti itu adalah munculnya kecenderungan Jakarta Sentris seperti terlihat dalam keanggotaan DPR sekarang ini. Akibatnya, mereka kurang sensitive terhadap permasalahan di daerahnya."

Menurut Gaffar, seorang anggota DPR yang sudah lama tinggal di Jakarta tentu saja sudah tidak banyak mengikuti perkembangan yang terjadi di daerahnya karena

[55] Afan Gaffar, *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 1999), hlm. 289. Analisa yang kurang lebih sama bisa ditemukan dalam penelitian Moh. Nafsar. Lih. Moh Nafsar, "Perilaku Politik Pemuda Perkotaan: kasus Surabaya" dalam *Analisis CSIS* tahun ke 26 no II tahun 1997, hlm. 168-179.

kesibukannya sebagai legislatif yang banyak menyita waktu; dia juga telah terokupasi dengan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Bahkan, tidak mustahil dia mengalami proses *"up rooted"* karena di daerah sudah banyak sekali perubahan, sementara pola berpikir anggota DPR tersebut adalah pola berpikir Jakarta.

Menurut Gaffar, implikasi yang jelas dari proses rekrutmen yang tertutup seperti itu[56] akan membentuk anggota DPR yang akomodatif terhadap pemerintah dan pimpinan partainya di mana mereka akan mengorbankan kualitas dan mengutamakan *patronage* sebagai akibat negative bagi penampilan anggota DPR ketika mereka memasuki dunia politik Jakarta yang sangat rumit. Tidak jarang pula pimpinan partai politik merekrut orang-orang yang memang mempunyai basis kekuasaan yang kuat pada tingkat lokal tetapi tidak memiliki latar belakang dan kecakapan yang cukup untuk menjadikannya seorang legislatif yang baik dan tangguh.

Gaffar memberikan sejumlah contoh dengan perbandingan seorang Tuan Guru di Lombok dengan seorang Kyai di Jawa Timur. Sebagai contoh, seorang Tuan Guru di Lombok memang memiliki basis kekuasaan yang sangat besar di Lombok. Tetapi, basis kekuasaan yang kuat pada tingkat lokal belum menjadikan ia seorang legislatif yang tangguh karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Tetapi seorang kyai yang sangat terkenal di Jombang Jawa Timur memang sangat dihormati dan disegani di Jawa Timur. Tetapi ia belum menjadi seorang legislatif yang tangguh karena dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR diperlukan dukungan ilmu pengetahuan yang bersifat sekular.

---

[56] Gaffar, *Politik Indonesia .... op.cit.,* hlm. 290.

Banyak persoalan yang bersifat tekhnis yang harus dihadapi seorang anggota DPR untuk didiskusikan dengan kalangan pejabat pemerintah eksekutif dengan pengalaman yang sangat luas karena mereka merupakan birokrat karir yang tahu benar persoalan di departemennya. Gaffar menjelaskannya demikian,[57]

> "Oleh karena itu tidak jarang kesetaraan antara pejabat eksekutif dengan sebagian besar anggota DPR itu menjadi sangat pincang, apalagi kalau anggota DPR yang terpilih ini betul-betul baru memasuki rimba raya politik Jakarta."

Gaffar menjelaskan untuk rekrutmen anggota DPR perlu diadakan perubahan sistim pemilihan umum dari sistem pemilihan yang bersifat *Proportional Representation* (PR) menjadi sistim pemilihan yang bersifat pluralitas yaitu dengan menggunakan *simple majority single ballot system* yang di Indonesia dikenal dengan sistim distrik.[58] Dengan sistim ini, *the winner takes all*, artinya dengan perolehan suara mayoritas yang sederhana si pemenang akan memenangkan semua perolehan kursi di wilayah itu. Dengan menggunakan sistim rekrutmen seperti itu, wajah DPR akan berubah karena akan terpilih anggota DPR yang lebih berkualitas, lebih berwibawa dan mempunyai kecenderungan untuk independen dari partai dan lebih berorientasi pada masyarakat pemilih atau *constituency* mereka.[59]

Pandangan Affan Gaffar tentang politik aliran di masa Orde Baru di Pulau Jawa tersebut bisa ditelusuri dalam peta politik nasional di masa Era Reformasi dalam

---

[57] *Ibid.* hlm. 291.
[58] *Ibid.* hlm. 297.
[59] *Ibid.* hlm. 298.

lima kali Pemilu Legislatif sejak tahun 1999 hingga Pemilu Legislatif tahun 2019. Penelusuran itu misalnya dengan melihat bagaimana para politisi Kristiani bisa memenangkan suara signifikan dalam pemilu legislatif yang justru mayoritas disejumlah daerah yang mayoritas kuta berpenduduk dengan agama Islam yang kuat dan keras (Jawa Barat, Banten, DKI dan sejumlah provinsi lain). Mengandalkan isu primordial dan patron klien saja tentu tidak mencukupi ketika melihat keterpilihan caleg-caleg Kristen justru dari basis Islam yang kuat.

Tentu saja tidak bisa ditolak begitu saja adanya unsur nasionalisme dalam keterpilihan caleg-caleg Kristen tersebut. Karena tidak mungkin caleg Kristen terpilih dari basis Islam yang kuat kalau mereka tidak dipilih oleh warga yang sangat mayoritas berbeda suku dan agama dengan caleg Kristen yang berarti di sana ada semangat nasionalisme, baik yang diusung oleh partai maupun yang diusung oleh caleg bersangkutan. Keterpilihan caleg Kristen tidak bisa dilepaskan dari sikap nasionalisme dan visi misi partai pengusungnya sehingga mereka bisa diterima.

4. Fondasi Nasionalisme dalam Keterwakilan Politik

Fondasi nasionalisme dalam sistem perwakilan politik disampaikan oleh George McTurner Kahin dan Burhan Magenda. Dalam pemahaman Kahin, sangat penting memaknai nasionalisme sebagai perekat kuat dan menjadi pondasi dasar bagi sebuah negara bangsa terutama negara bangsa yang terdiri dari multi kultural dan multi agama seperti Indonesia.[60] Dalam paham Burhan Djabir Magenda,

[60] George McTurner Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Indonesia*, (alih bahasa Nin Bakdi Soemanto), Jakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1955. Judul asli, George

nasionalisme tersebut harus menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari missi yang diusung juga oleh partai-partai politik.[61]

Kahin menguraikan[62] bahwa nasionalisme di zaman pergerakan nasional bersifat menyeluruh di tanah air. Nasionalisme tersebut lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon atau kritik akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air. Muncul kesadaran dan sentimen nasionalisme pada zaman pergerakan nasional karena perasaan ketertinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagai akibat dari ideologi kolonialisme Belanda. Peletakan paham dasar jiwa nasionalisme pada zaman pergerakan nasional karena semagat bersama sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif).

Menurut Kahin, Nasionalisme Indonesia berakar dari keadaan Indonesia mulai dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Fenomena Nasionalisme tidak lahir secara sendiri, tetapi sangat terkait dengan konsep bangsa atau negara dan kewarganegaraan/kebangsaan, termasuk produk dari imperalisme/kolonialisme.[63] Nasionalisme sebagai produk dari sejarah sebuah bangsa merupakan jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik ekonomi dan sosial tertentu. Nasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem

---

McTurner Kahin, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, (Ithaca, NY: Cornel University Press, 1952) hal 12 .

[61] Burhan Djabir Magenda, "The Integration in a Complex Indonesia" dalam *Majalah TELSTRA* No 64 Januari-Februari 2001, hlm. 62. Pemahaman Kahin tentang nasionalisme untuk konteks Indonesia yang tuntas dan mendalam sebagaimana diutarakan oleh Burhan Djabir Magenda, patut menjadi rujukan. Lih. Burhan Magenda, ''In Memoriam: Prof George McTurnan Kahin," dalam *Harian KOMPAS*, Rabu, 2 Februari 2000.

[62] Kahin, *op.cit.,* hlm. 43.

[63] *Ibid.,* hlm. 28.

eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus menerus. Pertentangan ini tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi, sosial dan kultural. Oleh sebab itu, suatu gerakan-gerakan yang bersifat nasional muncul menentang kolonialisme, dan berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu tersebut karena didorong oleh semangat nasionalisme.

Menurut Kahin, kehadiran Belanda justru memunculkan rasa patriotisme setempat menjadi satu patriotisme yang merangkul semuanya[64] dengan cara menggalang orang-orang berbeda bahasa dan kebudayaan ke dalam satu kesatuan politis sehingga terbentuk kesadaran kelompok. Selain batas-batas politis, tradisi kejayaan masa lalu terutama keberhasilan Sriwijaya dan Majapahit dan agama Islam sebagai mayoritas di Indonesia dan penggunaan bahasa melayu pasar yang dijadikan sebagai bahasa persatuan membantu mempercepat terjadinya nasionalisme.

Perkembangan nasionalisme Indonesia muncul dalam bentuk "Gerakan Emansipasi Wanita" oleh R.A. Kartini tahun 1912, Kongres Pemuda pertama dan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908, Gerakan Jawa Muda (*Jong Java*) tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912, Gerakan Pribumi(*Inlandsche Beweging*) tahun 1914, Kongres Kebudayaan tahun 1916, dan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan dikemudian hari muncul organisasi lainnya yang lebih bersifat kesukuan, seperti Jong Sumatra, Jong Celebes dan lain-lainnya.

Di masa menjelang kemerdekaan yakni ketika penjajahan Jepang, puncak nasionalisme tersebut mendapat

[64] *Ibid.,* hlm. 49.

bentuknya di saat perumusan kehendak untuk merdeka dengan pembentukan BPUPKI. Di hadapan peserta sidang BPUPKI, Soekarno menunjukkan secara terang-terangan rasa anti-Jepang lewat pidatonya yang menggariskan lima prinsip dasar, *Pantja Sila* yang dianggap dapat membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat suatu Indonesia yang merdeka.[65] Menurut Burhan, George McTurner Kahin mampu menjelaskan akar-akar sosial, ekonomi dan politik dari revolusi kemerdekaan Indonesia dengan pendekatan historis. Kahin melihat bahwa ideologi politik sosial demokrat juga terdapat di Indonesia.[66]

Melanjutkan pandangan George Kahin di atas, Burhan Magenda melihat bahwa nasionalisme yang telah tertanam dengan sangat dalam sejak masa perang menuju untuk kehendak kemerdekaan itu menjadi perekat yang sangat kuat bagi berlangsungnya sebuah bangsa seperti Indonesia. Untuk konteks nasionalisme Indonesia, Burhan menjelaskan:[67]

> "*The strength of nationalism is important for the continuity of a nation state especially for a complex nation state. In the Indonesian context, for example, nationalist ideology was said by George Kahin to begin from the start of the 20th century, leading to the Youth Pledge of 1928 and the independence revolution of 1945-1950. Some countries have chauvinistic national ideologies that they fight against each other, like the fascist ideology under Hitler in Germany, Mussolini in Italy and Tojo in Japan. Some other countries suffer*

[65] *Ibid.,* hlm. 155-159

[66] Burhan Magenda, ''In Memoriam ...'' *op.cit.*

[67] Burhan Djabir Magenda, "The Integration in a Complex Indonesia" dalam *Majalah TELSTRA* No 64 Januari-Februari 2001, hlm. 51.

internal wars, as in Biafra in Nigeria and the South Maluku Republic (RMS) and others in Indonesia."

[Kekuatan nasionalisme menjadi penting bagi kelangsungan sebuah Negara bangsa khususnya bagi sebuah Negara bangsa yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, misalnya, ideology nasionalis sebagaimana dikatakan George Kahin mulai muncul di awal abad ke -20, yang diawali oleh kelahiran Sumpah Pemuda 1928 dan revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1950. Beberapa Negara memiliki ideologi nasional yang khauvinistik sehingga mereka berperang satu sama lain, seperti ideologi fasis di bawah Hitler di Jerman, Mussolini di Italia dan Tojo di Jepang. Beberapa Negara lain yang menjadi derita perang secara internal misalnya di Biafra Nigeria dan Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan yang lain di Indonesia.]

Dalam pandangan Burhan Magenda, di beberapa Negara Asia dan Afrika, proses pembangunan kebangsaan *(nation building)* terkait ideologi nasionalis dipelopori oleh *founding fathers* seperti Soekarno-Hatta di Indonesia. Pada masa pasca colonial seringkali menimbulkan konflik. Mengutip pendapat Benedict Anderson, Burhan menegaskan bahwa nasionalisme sebagai sebuah ideology membentuk suatu masyarakat imaginer *(imagines communities)*.[68] Kehadiran partai-partai politik pun merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penguatan nasionalisme dimaksud. Semangat itulah yang terus menerus juga harus dipegang oleh partai-partai politik

[68] *Ibid.*, hlm. 50.

hingga sekarang. Burhan Magenda menjelaskan parpol dan ormas di Indonesia sudah berdiri sejak awal abad ke 20 seperti Boedi Otemo, ISDV, Serikat Islam, Muhammadiyah, PKI, Nahdlatul Ulama, dan PNI. Ini memperlihatkan kuatnya ideologi nasionalis yang dibawa parpol.

Pada Pemilu 1955 misalnya, partai ethnic boleh dikatakan kurang berhasil ataupun gagal total., yang agak berhasil hanyalah Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan partai etnik lainnya di Jawa Barat gagal merebut kursi DPR maupun DPRD. Pada pemilu 1999 Partai Tionghoa Indonesia yang *ethnic-oriented* gagal dibandingkan Parta Bhinneka Tunggal Ika yang majemuk yang berhasil memperoleh satu kursi DPR walaupun basis pemilihnya tetap keturunan Tionghoa. Menurut Burhan, pada masa pasca colonial, partai politik berhasil dalam pendidikan, sosialisasi, dan rekrutmen politik. Rakyat menjadi melek politik dan paham terkait dengan isu-isu politik nasional.[69]

5. Penutup

Bagaimana dengan praktek pemilu di Era Reformasi sebanyak lima kali yang sudah dilakukan yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019? Pelajaran teramat berharga dari pemilu-pemilu sepanjang Era Reformasi ini yang mengedepankan demokrasi secara lebih baik dibandingkan sekedar formalitas demokrasi sebagaimana dipraktekkan dalam pemilu sepanjang masa Orde Baru tentu patut untuk diperhatikan. Praktek demokrasi di masa Era Reformasi memberi gambaran akan kematangan demorasi Indonesia yang dimasa awal tahun 1998 pasca jatuhnya pemerintahan

[69] *Ibid.,* hlm. 62.

Orde Baru menciptakan kebebasan yang terkesan sebebas-bebasnya.

Salah satu contoh dari pembuktian kematangan itu mungkin sedikit atau banyak bisa dilihat dari sejauh mana sekelompok berbeda agama dan suku justru terpilih dari daera pemilihan berbasis agama dan suku yang berbeda. Dalam konteks penjelasan berikut akan dilihat bagaimana belajar dari masa pemilu era reformasi ini keterplihan sejumlah caleg beragama kristiani dari basis-basis Islam.

Setidaknya dengan melihat bagaimana salah satu sisi ini akan menguji juga apakah politik aliran sebagaimana dmaksudkan Affan Gaffar dan Clifford Geertz masih teramat dominan dalam peta politik menuju keterwakilan polik Indonesia dewasa ini. Bab berikut akan pembahasannya yakni pentingnya belajar dari pemilu-pemilu Era Reformasi.
****

BAB 6
KETERWAKILAN POLITIK PADA PEMILU ERA REFORMASI: Belajar dari Keterpilihan Minoritas

1. Pengantar

Sistim perwakilan politik yang digagas oleh sejumlah pemikir politik tentang politik keterwakilan sebagaimana diungkapkan dalam bab-bab terdahulu merupakan hasil pemikiran setelah melihat bagaimana perkembangan politik keterwakilan di hampir seluruh belahan dunia. Allan Ware melihat kehadiran figure atau sosok yang mampu menarik simpati pemilih akan menjadi wakil pilihan rakyat di era modern. Sementara sistim keterwakilan menurut Anne Philips yakni harus merujuk pada *politics of presence* (politik kehadiran) adalah salah satu penegasan tentang pentingnya kehadiran langsung para pihak yang harus diwakili. Bagi Philips, posisi si terwakil harus benar-benar hadir dalam perwakilan politik tanpa harus memberikan perwakilan dimaksud ke wakil yang bukan rumpunnya karena bisa malah bertindak salah dan tidak paham dari prinsip dasarnya.

Termasuk dalam konteks sistim perwakilan politik di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Clifford Geertz, Affan Gaffar, Maswadi Rauf adalah gambaran dari sstem politik Indonesia dalam mewujudkan perwakilan-perwakilan politik di masanya masing-masing. Jika Clifford Geertz memahami sistim perwakilan politik Indonesia sarat dengan aspek aspek primordial, yang

kemudian oleh Maswadi Rauf melihatnya bahwa ada dua aspek primordial yang selalu masuk dalam peta politik Indonesia yakni aspek primordial suku dan primordial agama. Dalam tataran yang cukup mengkhawatirkan, Maswadi Rauf menegaskan bahwa isu primordial agama jika masuk dalam tataran politik menjadi aspek primordial yang paling menakutkan. Maka sebaiknya dan mestinya isu primordial terutama atas nama agama tidak dibawa-bawa dalam politik praktis Indonesia.

Lalu bagaimana dengan politik aliran yang dikemukakan oleh Affan Gaffar yang melihat bahwa dalam konteks para pemilih di Pulau Jawa dua aspek paling dominan, yakni politik aliran terhadap kalangan santri, abangan dan priyayi, serta kehadiran sosok tokoh pemimpin organisasi sebagai acuan pilihan politik. Pikiran Affan Gaffar terakhir ini sejajar dengan pandangan James Scoot terkait politik *patron and client* di mana *client* atau masyarakat pemilih selalu akan cenderung mengikuti patron atau sosok yang dikaguminya dan yang berpengaruh sangat serius terhadap diri pribadinya.

Pertanyaannya, bagaimana dengan pemilu legislative yang terjadi di Indonesia sejak Era Reformasi? Penting untuk melihat apakah pandangan-pandangan sistim keterwakilan politik di atas berlaku dengan proses penentuan perwakilan politik di masa era Reformasi. Pemaparan berikut dengan fakta-fakta yang terjadi dengan para politisi beragama Kristiani di basis Islam yang kuat dalam pemilu Era Reformasi akan memberi pemahaman baru terkait proses penentuan perwakilan politik Indonesia.

2. Maraknya Politik Identitas

Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Tahun 2019 di Indonesia sarat dengan politik identitas agama. Berlanjut pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, situasi pemilihan mempertegas politik identitas agama tersebut. Bisa jadi ketiga masa pemilu tersebut merupakan masa-masa paling suram dalam politik Indonesia sepanjang sejak kemerdekaan yang sarat dengan penjatuhan salah satu kubu atas nama penggunaan identitas tertentu dalam politik. Masyarakat cenderung tidak bergairah melanjutkan proses demokrasi karena kampanye hitam dan kotor merusak pemilihan umum. Sosok demokrasi Indonesia terkesan "dikotori"oleh sangat meluasnya isu-isu politik identitas atas nama agama dan suku serta latar belakang si calon sejak Pemilu Presiden 2014, yang berlanjut pada Pemilu Kada DKI dan Pemilu Presiden 2019.

Di ketiga masa pemilu tersebut, para calon pun seolah 'dipaksa" terbelah sebagai kubu-kubuan. Ada kubu yang dipersepsikan dengan kubu yang berada dalam partai Allah bagi pendukung identitas agama tertentu dan partai Iblis dilabelkan bagi yang berseberangan dengannya. Prinsip-Princip demokrasi yakni hormat pada martabat manusia, tidak dimasuki isu-isu primordialitas seperti dianjurkan oleh Maswadi Rauf, pemilihan yang terbuka dan adil, kebebasan bagi para pemilih, semuanya justru terasa sangat memudar bahkan hilang yang sempat merusak demokrasi Indonesia. Sejak dulu isu politik identitas agama paling berbahaya bagi demokrasi dan proses politik sehat di Indonesia.

Namun bagaimana dengan pemilu legislative dalam rentang waktu Pemilu 2014 dan pemilu 2019 tersebut khususnya terkait dengan kalangan minoritas?

Kalangan minoritas yang akan dicoba dilihat dalam materi berikut adalah kalangan politisi Kristiani pada masa pemilu legislative 2014 dan 2019. Pertanyaannya, Bagaimana nasib para politisi Kristen sebagai kalangan minoritas dalam situasi politik identitas agama yang sangat keras tersebut apakah juga menjadi korban dari politik identitas? Bagaimana keterpilihan para caleg beragama Kristiani berpengaruh saat itu justru ketika mereka dicalonkan oleh partai politiknya dari daerah berbasis Islam yang kuat? Sikap personal caleg Kristen yang dapat dipercaya antara kata dan perbuatannya, lebih sedikit berbicara tetapi banyak berbuat mampu melampaui ketakutan dalam politik identitas agama. Penelitian ini melihat Pemilihan Umum 2014 dan 2019 untuk menjadi refleksi menuju Pemilihan Umum Serentak 2024 lewat wawancara mendalam dan kajian literatur.

Resiko politik identitas agama yang buruk dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, Pemilu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dan Pemilu Presiden Tahun 2019 menciptakan ketakutan sebahagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat anti pati dengan proses pemilu yang memperburuk demokrasi Indonesia. Pemilu Presiden 2014 dan 2019 mengusung Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilu 2019 lebih buruk dari Pemilu 2014 karena terlihat sangar, menakutkan, politik identitas terbuka, dan berlangsung rusuh. Kampanye negatif bertebaran terhadap Prabowo Subianto sementara Jokowi menjadi sasaran kampanye hitam.

Politik identitas suku, ras, antargolongan, terutama atas nama agama (SARA) sarat mengotori ruang publik selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019. Kubu yang memperjuangkan ideologi nasionalis demokratis berhadapan dengan kubu yang memperjuangkan nilai-

nilai Islam yang dikhawatirkan untuk pembentukan ideologi negara agama. Padahal isu identitas agama dalam politik Indonesia mestinya sudah berakhir sejak perdebatan Pancasila sebagai ideologi sejak tahun 1945 hingga tahun 1957.

Dua provinsi sayap ibukota negara yakni Provinsi Banten di sebelah Barat dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur memberikan kekalahan kepada petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Tahun 2014 dan Tahun 2019. Jokowi kalah karena pencalonannya tidak direstui oleh para alim ulama dan tokoh Islam fanatik di sana.

Selain pemilu Presiden itu, isu politik ideologi agama yang buruk terjadi juga di Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Pasalnya, Gubernur DKI petahana yang beragama Kristen, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memenangkan putaran pertama pemilihan gubernur, dan di putaran kedua Ahok diadili habis-habisan. Dipicu oleh ketergelinciran lidahnya atas kesalahan pengucapan terkait isi Kitab Suci Alquran dalam suatu kampanye di Kabupaten Kepulauan Seribu, Ahok divonis hukuman penjara oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(final and binding)* persis saat tahapan pemilihan gubernur masih berlangsung. Tiga pengalaman pahit politik identitas berturut turut tersebut menimbulkan luka batin para pemilih.

Tabel 1: Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

	Joko Widodo-Mahruf Amin	**Prabowo Subianto-Sandiaga Uno**	**Selisih Suara**
Provinsi DKI Jakarta	3.279.547 suara (51,68%)	3.066.137 suara (48,32%)	Joko Widodo unggul: 213.410 suara (3,36%). jumlah sah: 6.345.684 suara,
Provinsi Jawa Barat	10.750.568 suara (40,07%)	16.077.446 suara (59,93%).	Prabowo unggul: 5.326.878 suara (19,86%) Jumah sah: 26.828.014 suara
Provinsi Banten	2.537.524 suara (38,46%)	4.059.514 suara (61,54%),	Prabowo unggul: 1.521.990 suara (23,07%) Jumlah sah: 6.597.038 suara

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019)

Data di atas menjelaskan, di Provinsi Banten, Prabowo-Sandiaga mendapat 4.059.514 suara (61,54%) unggul jauh sejumlah 1.521.990 suara (23,07%) dari pasangan Jokowi-Ma'ruf (Kompas, 2019). Sementara di Provinsi Jawa Barat, pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf hanya mendapat 10.750.568 suara (40,07%), Prabowo-Sandiaga unggul 5.326.878 suara (19,86%). Di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya menang tipis dengan meraih 3.279.547 suara (51,68%) dari Prabowo-Sandiaga (www.republika.co.id, 2019).

Politik identitas agama di atas memunculkan dua pertanyaan: *pertama,* apa penyebab menguatnya isu identitas agama dalam politik di Indonesia terakhir ini? *Kedua,* bagaimana nasib para politisi beragama Kristiani

saat itu ketika mereka dicalonkan oleh partainya di daerah-daerah berbasis Islam seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI, Sulawesi Selatan, Riau, dan lain-lain?

Maka penting menjawab kedua pertanyaan di atas dengan menampilkan gambaran umum dari traumatic masyarakat atas politik identitas, mengurai alasan kelahiran politik identitas agama yang cukup merisaukan, kemenangan Prabowo di tiga provinsi utama Indonesia, kiprah para politisi beragama Kristen di Basis Islam. Termasuk di antaranya bahwa politik identitas didukung para alim ulama kelompok garis keras untuk mewujudkan negara berideologi Khilafah sebagai catatan serius menuju Pemilu serentak 2024.

Kajian terkait politik identitas dalam konteks Indonesia dirasakan sangat penting untuk terus menerus digali untuk melacak bagaimana pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Akhir-akhir ini, komunitas ilmiah di Indonesia semakin meminati bidang kajian politik sebagai upaya mencari alternatif dari khazanah budaya sendiri untuk mengimbangi kekuatan dan kelemahan serta keberlakuan konsep-konsep politik yang berasal dari politik Barat.[70] Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, otoritas ilmu-ilmu sosial di Indonesia amat mendorong usaha oleh ilmuwan Indonesia mengembangkan konsep-konsep politik dari khazanah kebudayaan Indonesia sendiri.[71]

[70]Sulaeman, *Pemikiran Demokrasi Moh Hatta*, [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009), hlm. 73-79.

[71]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 48.

3. Nasib Politisi Kristen di Basis Islam

Bagaimana nasib para politisi Kristen di tengah situasi politik identitas agama Islam yang sangat memanas sepanjang Pemilu 2014, 2017 dan 2019 tersebut terutama bagi mereka yang menjadi calon legislative Ketika dicalinlandari daerah yang mahoritas penduduknya Bergama Islam yang fanatic dan dominan. Bagaimana nasib mereka dalam Pemilihan tahun 2024 mendatang? Dalam dua kali Pemilihan Umum Legislative (2014 dan 2019) di Indonesia, jumlah kursi dari anggota legisltif beragama Kristen justru meraih kursi secara signifikan. Provinsi Jawa Barat selalu memberi kursi legislative beragama Kristen yang cukup signifikan.

Tabel 2: Daftar Anggota Legislatif beragama Kristen di Enam Provinsi di Pemilu Legislatif 2014[72]

	PARTAI POLITIK					
PROVINSI	**PDIP**	**Gerindra**	**Demokrat**	**Golkar**	**Nasdem**	**TOTAL**
SUMUT	2	2	2	1	1	8 kursi
JABAR	***6***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 kursi***
DKI	5	-	-	-	-	5 kursi
JATIM	4	1	-	-	-	5 kursi
JATENG	2	2	-	-	-	4 kursi
RIAU	2	-	-	-	-	2 kursi
TOTAL	21 kursi	5 kursi	2 kursi	1 kursi	1 kursi	30 KURSI

Data dia atas menunjukkan kepad akia bahwa hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 memperlihatkan besaran kursi masing-masing partai politik yang diraih oleh para politisi beragama Kristiani di sejumlah provinsi.

[72] *Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014 – 2019.* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.

Tabel 3: Lima Partai Politik yang meraih suara tertinggi di enam Provinsi untuk Anggota legislative beragama Kristen pada Pileg 2019[73]

PROVINSI	POLITICAL PARTY					
	PDIP	**Golkar**	**Gerindra**	**Demokrat**	**Nasdem**	**JUMLAH**
DKI	7	1	-	-	-	8 kursi
JATENG	6	-	1	-	-	7 kursi
SUMUT	5	1	-	2	1	9 kursi
JABAR	4	-	-	-		4 kursi
JATIM	3	-	1	-	-	4 kursi
RIAU	2	-	-	-	-	2 kursi
JUMLAH	27 kursi	2 kursi	2 kursi	2 kursi	1 kursi	34 KURSI

Hasil perolehan kursi di atas dari para anggota legislative beragama Kristen tentu saja atidak bisa bisa dilepaslan dari upaya para kandidiat legslatif beragama Kristen itu sendiri bisa masuk dan diterima oleh pemilih beragama mayoritas Islam yang cukup dominan dan fanatk. Kaderisasi personal anggota legislative itu sendiri jauh lebih berperan dalam menentukan keterpilihannya. Jika dilakukan perbandingan antara peran dan pelibatan tokoh-tokoh Kristen masa lalu dan tokoh-tokoh Kristen masa kini di Indonesia, ada anggapan kuat bahwa peran dan pelibatan orang Kristen secara politik lebih nyata, cukup kuat, dan relatif berpengaruh di masa lalu dibandingkan masa kini.

Padahal dari segi persentase, jumlah penduduk beragama Kristiani (baik Protestan maupun Katolik) hanya sedikit, tetapi secara politik memiliki pengakuan yang setara dengan penduduk yang beragama mayoritas Islam. Bentuk kesetaraan dalam demokrasi yang dewasa. Perlu sekilas

[73] *Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2019 – 2024.* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.

melihat data persentase penduduk berdasarkan agama hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010,[74]

- Islam : 207.176.162 jiwa 87,18%
- **Kristen Protestan : 16.528.513 jiwa 6,96%**
- **Kristen Katolik : 6.907.873 jiwa 2,91%**
- Hindu : 4.012.116 jiwa 1,69%
- Buddha : 1.703.254 jiwa 0,72%
- Khonghucu : 117.091 jiwa 0,05%
- Lain-lainnya : 1.196.317 jiwa 0,51

==========

Total 237.641.326 jiwa 100,00%

Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 berdasrkan agama, maka total jumlah penduduk Indoensia beragama Kristiani adalah: penduduk beragama Kristen Protestan berjumlah 16.528.513 jiwa yang setara dengan 6,96% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia. Sementara yang bergama Kristen Katolik berjumlah 6.907.873 jiwa atau setara dengan persentase 2,91% dari seeluruh penduduk Indonesia. Maka jika keduanya digabungkan akan terdapat jumlah penduduk beragama Kristiani sejumlah Rp 23.436.386 jiwa atau setara dengan 9,87% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia.

[74] https://pkub.kemenag.go.id/ diakses pada Selasa 25 Mei 2021.

Tabel 4: Perolehan Kursi Anggota Legislatif beragama Kristiani pada Pileg 2019[75]

Pemilu 2019	Nama Partai	Jumlah Kursi	% Kursi	Keterangan
Partai Politik	PDI Perjuangan	48	8,35%	Total: 575 kursi (100%)
	NASDEM	12	2,09%	
	GOLKAR	8	1,39%	
	GERINDRA	6	1,04%	
	DEMOKRAT	5	2,36%	
	PAN	2	0,35%	
	PKB	2	0,35%	
TOTAL		**83 kursi**	**14,43 %**	

Data di atas menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menjadi penyumbang terbesar kursi bagi anggota legislative beragama Kristen di pemilu legislative terbaru lalu pda Pemilu tahun 2019.

Tabel 5: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014[76]

Pemilu 2014	Nama Partai	Jlh Kursi	% Kursi	Keterangan
Partai Politik	PDI Perjuangan	35	6,25%	Total: 560 kursi (100%) Kursi Kristen: 11,96%
	DEMOKRAT	11	1,96%	
	GERINDRA	11	1,96%	
	GOLKAR	7	1,25%	
	NASDEM	3	0,54	
	HANURA	3	0,54%	
TOTAL		**70 kursi**	**12,50 %**	

Data di atas menunjukkan perolehan kursi terbesar para caleg beragama Kristen melalui PDI

[75] Profil Anggota Dewan […]Periode 2019 – 2024, *op.cit.*
[76] Profil Anggota Dewan […]Periode 2014 – 2019, *op.cit.*

Perjuangan yakni 35 kursi. Diperingkat ke dua ada Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, calon Presiden 2014 dan 2019 yang didukung oleh para ulama Islam khususnya di Jawa Barat.

4. Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen

Di tengah isu politik identitas yang sangat panas 2014 dan 2019, apa yang membuat para pemilih Muslim menjatuhkan pilihan demokrasi pada politisi beragama Kristen? Kami mewawancarai mendalam sejumlah pemilih beragama Islam. Mereka adalah Abah Abidin (73 tahun) Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) se Kabupaten Sukabumi dan Haji Didi Supriadi (56 tahun) penduduk Kelurahan Mundusari Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan-Subang.

Dengan kalimat sederhana sangat bisa dipahami bahwa alasannya adalah karena kedua pemilih Muslim tersebut terpesona dengan sikap tulus dan baik caleg Kristen karena janjinya dapat dipercaya, mereka bertindak sebelum berbicara, sedikit berbicara tetapi banyak berbuat untuk kepentingan rakyat. Sikap jujur dan tidak berjanji muluk-muluk, dan selalu hadir di tengah persoalan masyarakat.[77] Maka benar kata Alan Ware bahwa jika potensi individu sudah layak dijual ke pemilih dan mampu menaikkan suara partai politik, maka peranan partai tidak lagi dominan.[78]

Argumentasi pemilih Muslim dapat dikategorikan dalam lima alasan, yakni: *pertama,* kemampuan caleg bersangkutan bersikap santun dan mampu mengambil

[77] Wawancara dengan Abah Abidin pendukung utama caleg Kristen di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat pada Sabtu 22 September 2018.

[78] Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996), hlm 54-58.

hati warga dalam nuansa tata krama agama dan budaya setempat.[79] *Kedua*, karena caleg yang bersangkutan adalah bahagian dari korban Orde Baru karena terkait dengan PKI sehingga menggalang dukungan dari Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba). *Ketiga,* kerelaan caleg Kristen untuk memberikan pengobatan gratis terbuka kepada seluruh warga yang kontinu setiap bulan tidak terikat hanya seat Pemilu.[80] *Keempat,* pendekatan pembangunan fisik sarana umum seperti mesjid, air minum, jalan raya. *Kelima,* kemampuan melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh lokal khususnya pemerintah daerah sekaligus dengan memanfaatkan gerbong partai.[81]

Tentu saja teori Affan Gaffar bahwa politik aliran masih sangat kuat di Indonesia sebagai preferensi pilihan bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat diterima. Dari analisis penelitiannya di daerah Brobanti, Yogyakarta, Affan Gaffar memperkuat teori bahwa ada hubungan yang sangat dekat di antara orientasi sosio religious individu dengan preferensi pilihan. Data dari Brobanti termasuk mendukung gagasan bahwa warga tertarik untuk memilih tergantung orientasi sosio religious mereka. Sehingga Santri akan tertarik untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Gaffar menjelaskan bahwa stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih Santri tampaknya menjadi lebih ideologis dalam membuat keputusan pilihan daripada Abangan. Buktinya pemilih Muslim tetap menjatuhkan pilihan politik kepada para

[79] Wawancara Haji Didi pendukung utama caleg Kristen di desa Mundusari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu 29 September 2018.

[80] Wawancara dengan Abah Abidin, *op.cit.*

[81] Wawancara dengan Haji Didi, *op.cit.*

caleg Kristen walaupun politik identities sangat kotor terjadi di masa Pemilu yang sama.

Ribka Tjiptaning seorang anggota legislative perempuan beragama Kristiani hasil Pemilu 2014 dan 2019 di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat dicintai dan dipilih warga beragama Muslim justru ketika Ribka secara terbuka mengaku diri sebagai keturunan dari pengikut Partai Komunis tahun 1955.[82] Ikatan emosionalitas yang sangat tepat seperti digambarkan oleh Clifford Geertz bahwa aspek politik ketika sudah berbaur dengan aspek primordialisme menjadi sesuatu yang sangat sulit dipisahkan. Penduduk Desa Cikolawing sudah terikat secara primordial sangat kuat terhadap Ribka persis seperti yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz. Padahal di Desa Cikolawing Kecamatan Pawenang itu sekitar 99,90% beragama Muslim yang memenangkan Ribka Tjiptaning.

Apakah pengalaman serupa ini masih akan terjadi dalam Pemilihan nasional serenak tahun 2024 yang diperkirakan akan membawa politik identas agama (Islam) yang akan semakin terang benderang untuk upaya mendirikan negara Khilafah Islam?

5. Penutup

Politik keterwakilan untuk pemilu legislatif ternyata tidak berpengaruh secara gamblang dengan maraknya politik identitas. Terlihat dari pemilu legislative 2014 dan pemilu 2019, perolehan kursi para caleg-caleg beragama minoritas justru tidak terlalu signifikan berkurang termasuk pemilihan untuk para caleg minoritas beragama Nasrani di basis-basis Muslim walaupun tensi politik identitas sangat marak saat itu. Ternyata isu-isu politik

[82] Wawancara dengan Abah Abidin, *op.cit.*

identitas lebih menyentuh pada pemilihan kepala daerah yakni Gubernur di DKI Jakara dan pemilihan Presiden Republik Indonesia, tidak terlalu memberi pengaruh signifikan pada pemilihan legislative walaupun proses pemilihannya dilakukan pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Dari pengalaman politik dengan penonjolan politik primordial atas nama agama dalam Pemilihan Nasional Indonesia 2014 dan 2019, dan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, maka keterwakilan politik mendapat beban yang lebih besar dibandingkan dalam situasi normal. Semakin menguatnya politik identitas atau primordalisme politik tentu akan menjadi tantangan sangat serius dan menjadi catatan penting bagi perwujudan negara demokratis. Jika isu primordialisme politik tetap dibiarkan merajalela dalam peta politik nasional dan lokal, bukan tidak mungkin primordialisme politik bakal menjadi ancaman serius bagi kesatuan bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Apalagi dalam Pemilu tahun 2004, Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri sehingga sangat dikhawatirkan pemenang pilpres adalah calon presiden yang diusung oleh pihak pendukung negara Khilafah. Demokrasi hanya akan bertumbuh lebih baik ketika kehidupan bernegara semua kalanin termasuk kalangan minoritas semakin nyaman, dan penegakan upaya menghormati martabat manusia walau berbeda suku dan agamanya, dan upaya upaya sejenis.

Usulan dari kajian Bab 6 ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut ke sejumlah wilayah lain untuk memperkuat apakah sesungguhnya politik identitas sedang bertumbuh di Indonesia? Misalnya apakah ada kandidat beragama Muslim justru menang di basis-basis

beragama Kristiani. Studi-studi demokrasi yang lebih luas dibutuhkan termasuk mencari tahu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia ke Pemilu 2024 nanti dan ke depannya setelah politik identitas yang sangat buruk di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu.****

DAFTAR PUSTAKA

Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009. Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2005.

Almanak Anggota Parlemen RI 2009-2014. Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu Cetro-Hans Seidel Foundation, 2010.

Beitz, C.R. *Political Equality: An Essay in Democratic Theory*. Princeton, 1989.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik (*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Comparative Government and Politics: An Introduction. Hampshire: MacMillan Press Ltd, 2016.

Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

------- *Democracy and its Critics.* New Haven, 1989.

Dhakidae, Daniel (Litbang Kompas). *Partai-partai Politik Indonesia: ideology, strategi dan program,* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1999.

Feith, Herbert dan Lance Castle. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965.* Jakarta: LP3ES, 1988.

Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (terj.)* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Fuqoha dan Sukendar. *Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019.* Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi. Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018.

Furnivall, JS. *Netherlands India: Studi of Plural Economy*. Cambridge: at the Unversity Press, New York: The macmillan company, 1944.

Gaffar, Afan. *Javanese Voters: a case study of election under a hegemonic party system.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

------- *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999.

Geertz, Clifford. (editor). *Old Societies and New States. The Quest for Modernitu in Asia and Africa,* New York: The Free Press, 1963.

------- *The Religion Of Java.* Glencoe, Ill: Free Press, 1960.

Hagopian, Mark N. *Regimes, Movement, and Idiologies.* London: Longman, 1978.

Hague, Rod Martin Harrop, and Shaun Breslin. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Hampshire: MacMillan Press Ltd, 2016.

Hasil Penelitian Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014. Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).

Huntington, Samuel. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991.

Imawan, Riswandha. *Mencari Alternatif Kuldesak Pemilu 2004*, Yogyakarta, 2004.

Irsyam, Mahrus-Lili Romli. *Menggugat Partai Politik: seri buku politik*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2003.

Jurnal Ilmu Politik 1, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Jurnal PSPK: Pemilu Lokal,. Jakarta: PSPK [tanpa tahun].

Kaelani, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2005.

Kahin, George McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Ithaca, NY: Cornel University Press, 1952.

Klingemann, Hans-Dieter et al. *Partai, Kebijakan, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Kristiadi, J. *Pemenangan Pemilu 2009 dan Tata Kelola Parpol* (makalah). Jakarta: Gedung CSIS, 2009.

Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi" dalam Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018/ISSN: 1978-

Leclerc, Jacques. *Pengantar" dalam Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi*. Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1996.

Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries.* New Haven, 1984.

Magenda, Burhan D. *Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan PolitikIndonesia: Beberapa Pendekatan Teoritis*. Makalah dalam Kongres II HIPIS/Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial, 14-20 November 1977, Manado.

Magnis-Suseno SJ, Franz. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

_____, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis.* Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Majalah TELSTRA No 64 Januari-Februari 2001.

Membina Hubungan dengan Konstituen, Seri Penguatan Legislatif. USAID dari rakyat Amerika: Local Government Support Program, 2011.

Nas, Jayadi. *Konflik Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2008*, [Disertasi]. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Noor, Firman, dkk. *Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordial di Indonesia*. Jakarta: P2P – LIPI, 2008.

Nurhasim, Moch., dkk. *Jurnal Penelitian Politik Vol. 6 No. 1 Tahun 2009.* Jakarta: LIPI Press, 2009.

Pamungkas, Sigit *Partai Politik: teori dan praktek di Indonesia.* Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.

PDI Perjuangan. *Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.* Keputusan Kongres II PDI Perjuangan Denpasar, Bali, 28-31 Maret 2005

PDI Perjuangan. *Piagam Perjuangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan,* Denpasar, Bali, tanggal 06-09 April 2010 No. 09/TAP/Kongres III/ PDI-P/2010.

Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU, Rabu, 5 Mei 2004.

Philips, Anne. *The Politics Of Presence.* Oxford: Clarendon Press, 1995.

Pitkin, Hanna. *The Concept of Representation.* Berkeley, 1967.

Poerwantana, P. K, *Partai Politik di Indonesia.* Jakarta, Rineka Cipta. 1994.

Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014 – 2019. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.

Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2019 – 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.

Rauf, Maswadi 2002, "Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal". (Makalah). Disampaikan dalam Loka Karya dengan Tema *"Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akutabilitas Pemerintahan Daerah*" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* dan Univeristas Diponegoro

(Undip), pada tangal 25-27 Maret 2002 di Hotel Patra Jasa Semarang.

Rauf, Maswadi *Konsensus Politik: sebuah penjajagan teoritis.* Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2000.

------- "Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal" (Makalah). Jakarta: 2002.

------- *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. Jakarta, Salemba Raya 6, 1 November 1997.

Reilly, Ben dan Andrew Reynolds. *Sistem Pemilu.* IDEA International Stockhlom, United Nations New York, dan IFES Washington DC, 2001.

Risalah Perundangan Konstituante Republik Indonesia tahun 1957.

Risalah Sidang BPUPKI-PPKI. Jakarta: Sekretariat Negara 1993.

Rozi, Syafuan (editor) et al. *Problematik Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan. Kasus Gerakan Pendukung Khilafah Ismaliyah*. Jakarta: LIPI Press, 2009.

Samosir, Osbin. *Membangun Gereja Diaspora Berwajah Kultural dan Transformatif.* Jakarta: IKKSU, 2004.

-------- (ed), *Panjangnya Jalan Politik Cosmas Batubara.* Jakarta: Jala Permata, 2008.

----------, *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat*. Jakarta: UKIPress, 2017.

Sartori, Giovanni*. Parties and Party Sistems: A Framework for Analysis.* Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

Scott, James C. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review* Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972).

Sihombing, Pendeta Harminto. *Sejarah Ompung Nommensen Di Tanah Batak.* [Tanpa tahun dan Penerbit]

Sudarsono, Juwono (editor). *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* . Jakarta: Gramedia, 1981.

Sulaeman. *Pemikiran Demokrasi Moh Hatta*, [disertasi]. Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009.

Suparto. *Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam*. Jurnal Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni 2019.

Surat keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 267/DPP/KPTS/VI/2003 tentang *Pedoman Penyusunan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabuapten/Kota Partai Golongan Karya* tanggal 04 Juni 2003, R-1.Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia. *IJ Kasimo: Hidup dan Perjuangannya.* Jakarta: Gramedia 1980.

van Klinken, Gerry, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen.* Yogyakarta: LKiS, Januari 2010.

Vlesenthal, East -Abraham Bridgestahl. *Politic Behaviour* vol 7 no 4, tahun 1997. [tanpa penerbit dan tahun].

Ware, Alan. *Political Parties and Party Systems.* United States, New York: Oxford University Press Inc., 1996.

Wijaya, D.N. *Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan.* Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 2, Desember 2016.

Yudi Widagdo. *Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno.* Journal Diversi, Volume 1, Nomor 1, April 2015: 1-113 44.

Tentang Buku…

Buku ini berbeda dari buku-buku sebelumnya terkait system Perwakilan Politik yang sudah terlebih dahulu hadir. Kebaruan paling mendasarnya (*newest/novelty*), buku ini tidak mengulang sejarah system perwakilan, jenis-jenis lembaga, format-format system legislative atau presidensial yang memang tidak mendapat pembaharuan berarti sejak hampir 200 tahun terakhir. Buku ini justru melihat bagaimana perubahan mendasar demokrasi di seluruh dunia yang mengubah peta sistem perwakilan politik. Bahkan ideologi partai politik yang dulu dianggap sebagai satu-satunya ukuran determinan penentuan perwakilan politik malah saat ini dianggap sudah usang, tak layak jual untuk penentuan perwakilan politik. Figure politik, kehadiran langsung pihak yang diwakili, pengaruh primordialisme politik, termasuk polit
ik identitas dalam pemilihan umum dalam konteks Indonesia menjadi format mendasar buku in merumuskan sistem perwakilan politik di era modern. Maka buku *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern* ini sangat layak sebagai buku referensi bagi para peminat Ilmu Politik, para penggiat pemilihan umum dan demokrasi secara luas, serta tentu saja untuk para mahasiswa Ilmu Politik secara khusus, dan bagi masyarakat luas yang tertarik dengan dunia akademik politik.

BIOGRAFI PENULIS

DR OSBIN SAMOSIR,M.Si, lahir di Pulau Samosir, Sumatera Utara Jumat 4 Mei 1973, menempuh pendidikan Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Onanrunggu Pulau Samosir (1980-1986) dan Sekolah Menengah Pertama Katolik Bakti Mulia Onanrunggu Pulau Samosir (1986-1989). Lulus dari SMA Seminari Menengah Christus Sacerdos Pematangsiantar tahun 1993. Osbin menyelesaikan S-1 Filsafat dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan tahun 1999. Osbin menyelesaikan S-2 (Magister) Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Salemba Jakarta lulus Februari 2004, dan menyelesaikan S-3 (Doktor) dari Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Januari 2013. Saat ini menjadi dosen di Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta.